

KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG

LARAS BAHASA

BOM

dan Bahasa

17

R

PERKOTAWAJARAN
BADAN SARANA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

HADIAH
KANTOR BAHASA LAMPUNG

HADIAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR BAHASA
PROVINSI LAMPUNG

<00042000>



LARAS BAHASA: B0m

KEMENTERIAN BUDAYA DAN BAHASA	
PB 499.217 LAR e	No. Indiv 0217 Tgl. : 29/07/2015 Tgl. : 18/03

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

LARAS BAHASA: Bom

Penanggung Jawab
Muhammad Muis

Redaktur
Sustiyanti

Penyunting
Kiki Zakiah Nur
Ramlan Andi

Desain Grafis
Endro Saputro

Sekretariat
Sukanto
Maryamah

KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG
2014

LARAS BAHASA: Bom

Penanggung Jawab
Muhammad Muis

Redaktur
Sustiyanti

Penyunting
Kiki Zakiah Nur
Ramlan Andi

Desain Grafis
Endro Saputro

Sekretariat
Sukamto
Maryamah

KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG
2014

Laras Bahasa: Bom
Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung,
Juni 2014

Kantor Bahasa Provinsi Lampung
Jalan Beringin II No.40
Kompleks Gubeneran
Teluk Betung, Bandarlampung
Telpon (0721) 486408, 480705, Faksimile (0721) 486407
Pos-el kbpl_2006@yahoo.com

Penyunting : Kiki Zakiah Nur, Ramlan Andi
Desain Sampul: Endro Saputro
Tata letak : Sukamto

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

499.277 7

LAR

- 1 Laras Bahasa : Bom, Rubrik Laras /Sustiyanti[et.al] (ed)-
Bandarlampung: Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 2014,
vii, 70 hal.; 14,7x21 cm

ISBN : 978-602-71693-1-9

2. BAHASA INDONESIA—LARAS BAHASA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Sambutan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung	vii
<i>Pasca-</i>	
Adian Saputra	1
Bom	
Yulfi Zawarnis	3
Cekrekan atau Pengokot	
Yuliadi M.R.	5
Bukan Ngehol	
Yuliadi M.R.	7
Antara Lampung dan Jakarta	
Ninawati Syahrul	9
'Markus'	
Oyos Saroso H.N.	11
Pemakaman atau Permakaman?	
Ninawati Syahrul	13
Merangsek dan Keteteran	
Adian Saputra	15
Saling Ketergantungan	
Fadhilatun H	17
Sup Buah dan Pindang Baung	
Ratih Rahayu	19
'LoL' atau Tertawa Lepas	
Oyos Saroso H.N.	21
Etika Berbahasa	
Mamad Ahmad	23
Jilbab dan Kerudung	
Ratih Rahayu	25
Bahasa Kedua	
Dian Anggraini	27
Mengunduh Bahasa Daerah	
Hesma Eryani	29
Pemecahan Masalah?	
Tri Wahyuni	31
Jayus	
Fadilatun	33

Kita (1)	
Agus Sri Danardana	35
Kita (2)	
Agus Sri Danardana	37
Bahasa Persatuan	
Ki Sanyoto	39
Cendol dan Bata di Dunia Maya	
Mamad Ahmad	41
Dampak Positif Penggunaan Kosakata Asing	
Chairil Anwar	43
Pemekaran Wilayah?	
Kiki Zakiah Nur	45
Bangsa Dua Suku Kata	
Febrie Hastiyanto	47
Malpraktik atau Malapraktik?	
Kiki Zakiah Nur	49
Pewaris	
Sustiyanti	51
Dosa dalam Bahasa	
Febrie Hastiyanto	53
Senyampang Voltaire Huruf Miring	
Iwan Nurdaya-Djafar	55
Lidah Untuk Menggigit	
Dian Anggraini	57
Turun ke Bawah. Pleonasmekah?	
Diah Meutia Harum	59
Bahasa dan Perempuan	
Diah Meutia Harum	61
Problematika Imbuhan Ter-	
Chairil Anwar	63
Menghidupkan Q	
Suheri	65
Merubah dan Dirubah	
Priyo Anggono	67
Bus Tak Masuk <i>Bus Lane</i>	
F. Moses	69

Penulis 70

KATA PENGANTAR KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, Jakarta, Kantor Bahasa Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah yang diberi otoritas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Provinsi Lampung. Dalam konteks itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah melakukan beberapa kegiatan yang bertalian dengan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Lampung yang juga disebut Sai Bumi Ruwa Jurai ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini, yang dibina adalah para pengguna bahasa Indonesia agar tertib berbahasa, atau agar orang dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Upaya pembinaan itu, agar dapat menjangkau khalayak pengguna bahasa Indonesia yang lebih luas, dilakukan, antara lain, dengan penerbitan buku ini.

Sidang Pembaca yang budiman, kumpulan tulisan di dalam buku ini pernah diterbitkan di Harian Umum *Lampung Post*, Bandar Lampung dengan nama “Laras Bahasa”. Sejalan dengan nama itu pula, kali ini diterbitkan seri keempat buku *Laras Bahasa*. Sebagaimana saya tegaskan pada seri ketiga, seri pertama berjudul *Laras Bahasa: Fobia Bahasa Indonesia* (2008), seri kedua bertajuk *Laras Bahasa: Saya Ulun Lampung* (2009), seri ketiga *Laras Bahasa: Gurita* (2013). Seri keempat ini diharapkan juga selain untuk menambah kelengkapan pustaka kebahasaan dan kesastraan pembaca juga untuk memperlihatkan kesinambungan program dan perencanaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia di daerah Provinsi Lampung—dalam hubungan ini kontinuitas dalam penerbitan karya kebahasaan dan kesastraan untuk memperkaya khazanah kebahasaan dan kesastraan.

Sidang Pembaca pasti akan melihat beragamnya tulisan yang terdapat di dalam kumpulan ini. Selain itu, buku ini juga membuktikan dan memperlihatkan minat serta kecintaan para pengguna bahasa Indonesia, seperti kalangan wartawan, linguis, peneliti bahasa, dan pemerhati atau peminat bahasa, terhadap bahasa Indonesia. Realitas itu menjadi fakta bahwa pengguna bahasa Indonesia juga merasa memiliki bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa persatuan ini. Saya tidak dapat menutupi rasa gembira saya manakala menyaksikan bahwa banyak anak bangsa ini merasa pembinaan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, bukan melulu menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama kantor dan balai bahasa di seluruh NKRI.

Saya ingin menengaskan kembali apa yang pernah saya tegaskan pada seri ketiga buku *Laras Bahasa*, yakni bahwa tatkala membaca tulisan-tulisan di kolom rubrik bahasa ini pengguna bahasa Indonesia seolah-olah diingatkan jika mereka selama ini, misalnya, telah keliru menggunakan suatu kata, istilah, ungkapan, ataupun kalimat, bahkan bentuk satuan linguistik yang lain. Orang agaknya perlu diingatkan kembali bahwa ada diksi atau pilihan kata yang patut dipertimbangkan penggunaannya di dalam berkomunikasi atau berbahasa, ada bentuk kebahasaan yang lebih patut dipilih dan lebih elok digunakan daripada bentuk yang lain, ada yang disebut bentuk baku, dan ada pula bentuk yang tidak baku, bahkan ternyata ada pula bentuk akrab dan bentuk cakapan, yang rupa-rupanya hanya pantas digunakan di dalam bahasa percakapan sehari-hari, tetapi tidak untuk bahasa ilmiah--misalnya. Sebagaimana dapat dilihat juga pada seri terdahulu, tulisan di dalam buku ini juga tidak menggurui, tidak mendikte, dan tentu saja tidak terlalu teoretis—yang disesuaikan dengan konsumsi pembaca surat kabar. Akan tetapi, apa yang disajikan di sini tidak pula dapat dikatakan sama sekali tidak ada dasar teoretis dan akademisnya. Jika lebih dicermati, beberapa tulisan bahkan terasa jenaka. Saya menduga pengguna bahasa tidak akan naik pitam setelah membaca tulisan dalam kemasan ini, barangkali hanya merasa merah kuping saja atau tersentil sedikit penggunaan bahasanya. Namun, saya yakin pengguna bahasa akan menerima sentilan kebahasaan itu. Pengguna bahasa bahkan mungkin akan—saya kira--merasa mendapat pencerahan, beroleh informasi baru tentang kebahasaan. Rutinitas dan pekerjaan yang bertumpuk selama ini, diakui ataupun tidak, sering membuat pengguna bahasa lupa akan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Bahkan tidak jarang, masalah kebahasaan itu tidak lagi menjadi perhatian pengguna bahasa dalam rutinitas seperti itu.

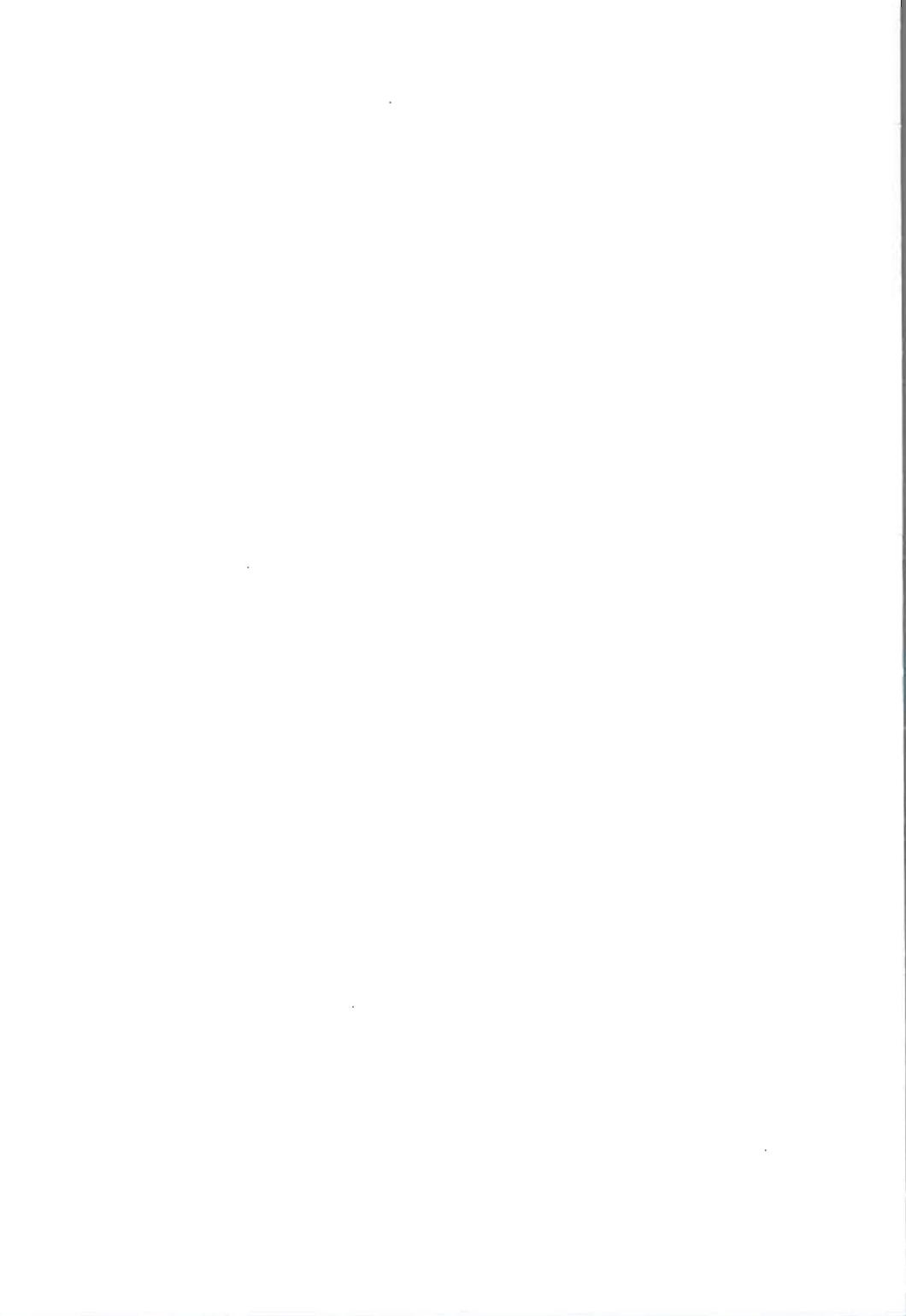
Saya menyampaikan tahniah dan terima kasih yang tulus kepada para staf Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang menjadi tim penerbitan ini yang sudah berusaha mempersiapkan penerbitan buku ini sehingga menjadi bentuknya seperti yang ada di tangan pembaca ini. Harapan saya ikhtiar seperti ini untuk pemajuan bahasa (dan sastra) Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, terus ditingkatkan pada masa mendatang..

Tim penerbitan sudah bekerja sebaik mungkin. Namun, walaupun penerbitan buku ini telah dipersiapkan dan diupayakan secara maksimal, saya yakin masih terdapat beberapa kekurangan. Tiada mawar yang tanpa duri. Tegur sapa yang membangun dari Sidang Pembaca untuk penerbitan yang berikut sangat kami harapkan.

Semoga Allah swt. mencatat usaha kecil Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini sebagai amal ibadah dan semoga buku ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bandarlampung, Agustus 2014
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Muhammad Muis



Setiap Senin hingga Jumat, di kantor kami, ada rapat bujet yang diikuti seluruh redaktur, bagian iklan, sirkulasi, dan bahasa. Pada momentum itulah saya--terkadang staf tim yang lain--mewakili teman-teman di Kompartemen Bahasa mengevaluasi bahasa koran yang terbit di hari tersebut. Dari banyak kata, kalimat, logika, frasa, dan istilah yang kami bahas, sebulan ini kata *pasca-* sering muncul.

Pasalnya, banyak di antara teman-teman yang belum memahami bagaimana menggunakan kata itu, termasuk membacanya. Terima kasih saya haturkan buat rekan Kurnia J.R, redaktur bahasa *Koran Tempo*, yang telah menulis soal *pasca-* itu di mediana, beberapa waktu lalu. Saya mendapat tambahan informasi tulisan ini dari dia.

Begini, kata *pasca-* itu memang bentuk terikat. Artinya, cara menulisnya digabung dengan kata setelahnya. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, ada beberapa contoh, antara lain *pascapanen*, *pascasarjana*, *pascakrisis*, *pascalahir*, *pascamodernisme*, *pascaoperasi*, *pascaperang*, *pascaproduksi*, *pascausaha*, *pascayuwana*, *pascadoktoral*, dan *pascajual*.

Arti *pasca-* ini ialah 'sesudah' atau 'setelah'. Nah, mungkin, karena alasan ini jua, banyak jurnalis yang mencari kata lain untuk digabung dengan *pasca-*. Maka, banyak bertebaran di media massa *pascameletusnya*, *pascaditembaknya*, *pascameninggalnya*, dan masih banyak lagi.

Yang perlu menjadi acuan kita ialah kata *pasca-* ini mesti ditemani dengan nomina yang merupakan kata dasar. Ia "enggan" digabung dengan kata lain yang ada awalan atau akhiran. Jadi, bisa dibilang, keliru jika kita menulis *pasca--pasca-* yang tadi saya sebutkan sebagai contoh.

Kalau mau menulisnya dengan maksud *setelah*, ya baiknya dipakai kata *setelah* atau *sesudah*. Dengan demikian, menulisnya dengan: *setelah meletusnya*, *sesudah ditembaknya*, *setelah meninggalnya*, dan lain-lain.

Mudah-mudahan sampai di sini kita menjadi jelas bahwa penggunaan kata *pasca-* punya aturan. Oya, satu lagi, masih mengutip Kurnia J.R., membacanya juga tetap *pasca-* pakai huruf c, bukan *paska-* dengan huruf k.

Masih ada bentuk terikat lain yang diakomodasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kita. Misalnya, *maha-*, *purna-*, *pra-*, *tuna-*, dan *pro-*. Yang mengherankan bentuk terikat selain *pasca-* ini relatif benar dalam penggunaan kalimat. Kita akan akrab dengan kata *mahaguru*, *mahasiswa*, *mahakuasa*, *prakongres*, *prakondisi*, *tunarungu*, *tunawicara*, dan *prorakyat*. Hampir tidak ada yang menulis *besar siswa*, *besar kuasa*, *sebelum kondisi*, dan *sebelum kongres*. Hampir semua jurnalis tepat menulisnya.

Namun, khusus untuk *pasca-*, memang unik. Hanya karena bentuk terikat dan bermakna *setelah* atau *sesudah*, kita pun dengan serampangan menggandengkannya dengan kata lain. Bahasa memang alat komunikasi sehari-hari. Asal kawan bicara kita memahami dengan baik maksud kalimat yang kita ujkarkan, sudah cukup. Namun, dalam ragam bahasa tulis, terlebih di media massa, kita memiliki pakem tersendiri. Inilah yang membuat ragam bahasa tulis ini berbeda dengan bahasa lisan. Andaipun kita mengakomodasi ujaran lisan dalam kalimat, kita mesti menulisnya dengan cetak miring (kursif).

Demikian pula dengan *pasca-*. Karena ia bentuk terikat dan tidak semua bisa digandeng dengan *pasca-*, kita pun dituntut cermat dalam menggunakannya. Mudah-mudahan *pasca-Ramadan* ini semua jurnalis benar dalam menggunakan *pasca-* dan teman-temannya dalam kalimat.

Bom

Yulfi Zawarnis

Onomatope atau peniruan bunyi merupakan salah satu gejala bahasa yang dapat menjadi salah satu alat terbentuknya kosakata. Kokok dan cicit merupakan contoh kosakata yang terbentuk karena gejala bahasa yang disebut onomatope. Dalam lingkup yang lebih luas, kita mengenal kosakata *bom* yang juga merupakan salah satu kosakata yang terbentuk karena gejala onomatope.

Bila ditinjau dalam *KBBI*, kata *bom* berarti senjata yang bentuknya seperti peluru besar yang berisi bahan peledak untuk menimbulkan kerusakan. Secara etimologi, kata *bom* muncul sebagai akibat peniruan bunyi dari suara yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut.

Kata *bom* memiliki beberapa kata turunan, baik yang diturunkan dari bahasa Indonesia maupun yang diturunkan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Turunan kata *bom* dalam bahasa Indonesia, di antaranya, *mengebom* ‘melemparkan, menghancurkan dengan bom’, *pengebom* ‘orang atau pesawat yang mengebom, alat untuk mengebom’, *pengeboman* ‘penyerangan, penghancuran, dsb. dengan bom; proses, cara, perbuatan mengebom’.

Ada juga kosakata bahasa Indonesia yang sepertinya terkait dengan istilah *bom*, padahal tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Kalaupun ada, pastilah itu merupakan pengaitan yang dipaksakan. Kita tentunya tahu istilah *bombastis*. Kosakata ini tak ada kaitannya sama sekali dengan *bom*. Dalam *KBBI*, *bombastis* berarti ‘banyak berjanji, tetapi tidak akan berbuat; banyak menggunakan kata dan ucapan yang indah-indah serta muluk-muluk, tetapi tidak ada artinya; bersifat omong kosong; bermulut besar’.

Kata turunan *bom* dalam bahasa Inggris yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya *bomber*, yaitu pesawat terbang pengebom, *bombardir* artinya mengebom, dan *bombardemen* yang berarti pengeboman. Istilah yang terakhir ini tidak banyak yang menggunakan, entah karena ketidaktahuan atau karena memang lebih suka menggunakan istilah *pengeboman*. Bila kita cermati lebih jauh, turunan kata *bom* yang diserap dari bahasa Inggris sering tidak tepat penggunaannya.

Meledaknya bom di Hotel Ritz Carlton dan J.W. Marriot serta penangkapan seseorang yang diduga merupakan salah satu pelaku pengeboman di Temanggung dan Bekasi memopulerkan kosakata *bomber*. Entah disengaja

atau tidak, penggunaan istilah *bomber* ini digunakan oleh banyak media massa di Indonesia. Bila kita kembali pada makna kata *bomber* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, saya yakin, semua orang setuju bahwa penggunaan kata *bomber* selama ini masih salah kaprah.

Mungkin saja kesalahan ini terjadi karena dalam bahasa Inggris, kata kerja atau kata benda yang diberi akhiran *-er* akan berubah menjadi kata benda yang merujuk pada orang, semisal *singer*, *writer*, *teacher*, dan *driver*. Bila ditelusuri maknanya berdasarkan konteks kalimat, penggunaan istilah *pengebom* lebih mudah dipahami dan lebih taat asas karena *bomber* tidak merujuk pada orang yang melakukan, tetapi merujuk pada alat.

Kesalahkaprahan penggunaan istilah tertentu yang diserap dari bahasa asing sering terjadi karena pengguna bahasa tidak tahu persis asal kosakata yang digunakan itu. Apakah kosakata itu diserap kata dasarnya ataukah merupakan kosakata yang sudah diserap utuh dari kata turunannya. Ini pula yang menyebabkan mengapa banyak pengguna bahasa yang lebih sering menggunakan *standarisasi* dan *legalisir* alih-alih *standardisasi* dan *legalisasi*.

Cekrekan atau Pengokot

Yuliadi M.R.

Cekrekan atau *pengokot*? Entah kapan munculnya kata *cekrekan*. Apa pula itu kata *pengokot*? Untuk kata *cekrekan*, barangkali kita (agak) akrab. Kata *cekrekan* untuk menyebut sebuah alat yang berfungsi menyatukan lembaran-lembaran kertas atau sejenisnya. Selain itu oleh sebagian orang ada yang menyebutnya dengan *cepretan*, *ceprotan*, atau *cengrekan*. Barangkali, kata *cekrekan* ini muncul karena bunyi yang ditimbulkan alat itu: cekrek, cekrek.

Apa itu *pengokot*?

Tentulah, kita harus peduli terhadap bahasa? Rasa-rasanya, kita (bahasa Indonesia) sudah punya kata untuk menyebut alat itu, yaitu *pengokot*. Kata *pengokot* berarti alat berupa besi yang dibengkokkan untuk memaut, melekat, atau menyatu.

Memang, telinga kita merasa asing dengan kata *pengokot*. Barangkali, disebabkan kurang sosialisasi atau kurang *pede* kita menggunakannya, kata *pengokot* tidak memasyarakat dan asing. Bila kita ucapkan kata *pengokot*, agak-agaknya terasa aneh dan tidak keren. Tentu, bukan itu alasan kita tidak menggunakannya. Lalu, kita semakin kerasan dengan kata *stapler* (serapan dari Inggris, *staple*).

Padahal, salah satu upaya mempertahankan bahasa (Indonesia) dalam kaitan penyerapan kata (baru): pertama, dilakukan pencarian kata/istilah itu dari bahasa daerah yang searti atau semakna. Bila tidak ada atau ditemukan kata/istilah yang dapat mewakili, dilakukan langkah kedua, yaitu penyerapan dari bahasa asing.

Kata *pengokot*, dalam perjalanannya, masih belum berterima dalam masyarakat dibanding dengan kata *stapler*. Kata *stapler* menurut *KBBI* berarti alat untuk menjepit (kertas, plastik, dan sebagainya) yang berisi *staples*. Kata *staples* berarti potongan logam berbentuk U yang digunakan untuk menjepit kertas atau pengisi *stapler*.

Payahnya lagi, masyarakat bahasa (Indonesia) juga sering terjebak pada kegamangan berbahasa, yaitu adanya kecenderungan berbahasa *keinggris-inggris-an*. Sekadar contoh sebagian orang masih gamang untuk mengatakan *pelantang* 'alat penguat suara' dan merasa asyik dengan kata *mic*. Begitu pula

kata *kudapan* 'makanan ringan' dengan *snack*. Lalu *kain rentang* lebih sering dikatakan dengan *spanduk*. Juga kata *anggaran belanja* dengan *bujet*, *makan malam* dengan *dinner*.

Rasa bangga dan cinta kita terhadap bangsa, termasuk bahasa, dewasa ini memang perlu dipertanyakan? Akankah kondisi ini terus terjadi? Entahlah, yang perlu kita ingat bahwa sudah begitu banyak milik kita (mungkin nantinya bahasa) diambil atau diakui oleh negara lain. Lalu bagaimana? Barangkali, kita semua mesti berbenah diri.

Bukan Ngehol

Yuliadi M.R.

Suatu kali seorang tetangga berujar, "Nanti malam diharapkan kedatangannya, ada *ngehol*." Tentu, karena diundang, tawaran itu saya iyaikan begitu saja. Padahal, dalam hati saya masih bertanya-tanya: apa sih *ngehol*? *Ngehol* itu apa?

Apakah kata itu sama dengan kata *ngetok* dan *ngedos*? Mungkin saja, pikir saya ketika itu. Sebab, kata-kata itu menurut saya, masih satu bentuk, yaitu satu suku kata. Kata *ngehol* pun terutak-atik: dari kata *hol* ditambah imbuhan (*me*)nge-. Sama halnya dengan kata *ngetok*: dari kata *tok* ditambah imbuhan (*me*)nge-, juga kata *ngedos*: *dos* ditambah imbuhan (*me*)nge-.

Persoalan *ngehol* tentu belum selesai. Bila kata *ngehol* itu dari kata dasar *hol*, lalu kata itu diserap dari bahasa apa? Saya pun berusaha mencari kata *hol* di *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Ternyata saya tidak menemukan kata itu. Yang ada adalah kata *haul*, yaitu peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali dan biasanya disertai selamatan arwah. Kata itu diserap dari bahasa Arab.

Lagi-lagi ini persoalan penyerapan kata. Menurut saya, penyerapan kata (*asing*) telah diatur dalam tata kata bahasa Indonesia. Artinya, dalam kaitan dengan *ngehol*, kita tidak bisa semaunya mengubah bunyi /au/ pada kata *haul* menjadi /o/ pada kata *hol*. Bahasa bukan masalah suka atau tidak, enak atau tidak, tapi ketertiban berbahasa.

Semestinya kata *ngehol* ditulis *ngehaul* atau *hol* seharusnya *haul*. Begitu pula halnya dengan kata *ngetok* dari kata *tok* menjadi bentuk kata kerja (*me*)*ngetok* ditulis *ngetuk*, *tuk*, dan *mengetuk*. Karena kata *tok* pun tidak tercantum dalam *KBBI*, yang ada kata *tuk* dan tiruan bunyi pintu, dinding atau lainnya diketuk.

Lalu bagaimana dengan kata *ngedos*? Tidaklah berbeda. Karena kata *dos* pun tidak ditemui, hanya ada kata *dus* 'kotak dari kertas tebal atau karton'. Semestinya, kata *ngedos* ditulis (*me*)*ngedus*.

Lagi-lagi bukan keseleo lidah, kita acap gamang melafalkan bunyi /u/ atau /au/ menjadi /o/. Cobalah kita tengok kata *telor* dan *telur*. Begitu pula pemakaian antara kata *totok* dan *tutuk*, sekadar contoh dalam kalimat, "Dokter memeriksa pasien dengan *menotok* punggung. Lain pula antara kata *bongkah*

dan *bungkah*. Agar kita tidak terjerumus dalam tanya yang panjang, manakah kata yang tepat? Tidaklah salah bila merujuk ke KBBI. Penulisan yang tepat dan benar, yaitu /telur/, /tutuk/, dan /bungkah/.

Lalu bagaimana pula antara kata *sorga* dengan *surga*. Kata-kata serapan asing, terutama bahasa Arab, hampir (tidak selalu) semua bunyi /o/ dapat digantikan dengan bunyi /a/ atau /u/. Sekadar contoh kata *sholat* menjadi /salat/ dan *mushola* menjadi /musala/. Tapi salah bila kata khotbah kita tulis /khotbah/.

Tidak perlu kita perdebatkan gejala bahasa apakah namanya perubahan bunyi antara /o/ dan /u/. Yang pasti gejala itu meresahkan saya, barangkali juga Anda. Karena pemakaian dalam masyarakat, bentuk bahasa itu berkembang. Tidak saja bentuk-bentuk kata meragukan kita juga menyulitkan. Lihatlah kata *bongkol* dan *bungkul*, *ropang* dan *rumpang*, *mongkor* dan *mungkur*, *copor* dan *cupar*, *tokak* dan *tukak*.

Tentu kita hanya bisa memilih kata yang benar dan salah menurut tata kata yang telah diatur dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang benar, yaitu /bungkul/, /rumpang/, /mungkur/, dan /cupar/ serta /tukak/.

Akan tetapi, kita jangan terjebak pada perubahan bunyi dari contoh kata-kata di atas. Bunyi /o/ seakan-akan dapat diganti dengan /u/. Karena perubahan bunyi itu, acapkali dipengaruhi (pengucapan) bahasa daerah. Untuk itulah, perubahan bentuk kata seperti kata *goyang* bukan menjadi /guyang/ walaupun sehari-hari kedua kata itu dapat kita temui. Begitu pula kata *bopeng* bukan menjadi /bupeng/, *loncat* bukan menjadi /luncat/, dan *tolan* bukan menjadi /tulan/.

Bahasa lahir dengan mana suka. Namun, dalam perkembangannya, bahasa memiliki tata aturan yang jelas: tata bunyi, tata kata, tata kalimat. Semua itu untuk memudahkan dan membantu masyarakat penggunaannya. Fungsi bahasa diciptakan adalah untuk kita: berekspressi, berkomunikasi, dan berinteraksi.

Antara Lampung dan Jakarta

Ninawati Syahrul

Setiap Jumat saya selalu pulang ke Jakarta. Begitulah rutinitas yang sudah saya jalani selama empat tahun. Saya bekerja di Lampung, tetapi keluarga di Jakarta. Kadang-kadang ada teman yang bertanya, "Nggak capek Mbak, antara Lampung dan Jakarta, kan, jauh?"

Selain frase *antara Lampung dan Jakarta*, sering juga saya dengar frase *antara Lampung dengan Jakarta* dan *antara Lampung hingga Jakarta*.

Saya merasa akhir-akhir ini makin banyak pengguna bahasa yang tidak lagi menghiraukan aturan bahasa. Sebagian pengguna bahasa tidak tahu persis, apakah bentuk yang digunakan benar atau salah. Jadi, sebagian pengguna bahasa masih mengabaikan aturan bahasa.

Dalam tatanan aturan bahasa, kelalaian kita memprihatinkan. Pada judul *antara Lampung dan Jakarta* di atas sudah benar. Akan tetapi, kenapa sebagian pengguna bahasa justru gemar menggunakan bentuk korelatif lain *antara Lampung dengan Jakarta* atau *antara Lampung hingga Jakarta*.

Maka dalam pemakaian keseharian, tidak jarang kita menemukan bentuk seperti *antara...dengan*, *antara...hingga*, dan *antara...melawan*, dalam kalimat yang lain. Maka satu-satunya bentuk benar adalah *antara...dan*. Bentuk korelatif adalah bentuk kata yang bersifat mempunyai hubungan timbal balik.

Masih berkaitan dengan *antara*, sebagian orang masih sering mengacaukannya dengan *antar*. Maka, *antarkedua provinsi* sering dipertukarkan secara keliru dengan *antara kedua provinsi*. Namun, *antara kedua provinsi* tidak benar. Bentuk *antara* selalu harus digunakan secara korelatif dengan *dan* sehingga menjadi *antara...dan*. Sebaliknya, *antar* adalah bentuk terikat yang pemakaiannya harus digabungkan dengan bentuk dasar bebas yang menyertainya.

Bentuk korelatif lain yang juga sering dikacaukan pemakaiannya. Bentuk *tidak...melainkan* dan *bukan...tetapi*, sepertinya juga perlu kita cermati. Bentuk *tidak* sebagai adverbial atau kata keterangan hanya dapat berpasangan dengan *tetapi*. Maka, yang benar adalah *tidak...tetapi*. Ada pun pasangan *bukan* sebagai adverbial adalah *melainkan*, maka bentuk korelatifnya *bukan...melainkan*.

Kelalaian kita pada bentuk korelatif ternyata tidak berhenti di situ. Adverbia *tidak...tetapi* dan *bukan...melainkan* sering dipakai untuk menegasi jenis kata yang tidak tepat.

Bentuk *tidak...tetapi* hanya bisa digunakan untuk meniadakan verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Adapun *bukan...melainkan* digunakan untuk membukankan nomina atau kata benda. Jadi, *tidak hanya meja tetapi juga kursi* adalah bentuk salah. Demikian pula *bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik* adalah bentuk keliru. Bentuk yang benar adalah *tidak hanya mengajar tetapi mendidik*, dan *bukan hanya meja melainkan kursi*.

Satu hal lagi yang harus kita cermati adalah *tidak lain dan tidak bukan*. Bentuk idiomatis itu maknanya 'benar-benar, hanyalah, ialah' (KBB1, 118). Akan tetapi, bentuk senyawa itu tidak dapat dijelaskan secara linguistik. Saya cenderung mengatakan *tidak lain dan tidak bukan* bersifat idiomatis. Bentuk idiomatis memiliki bentuk kesenyawaan. Jadi, tidak dapat seenaknya diubah konstruksinya, direduksi bentuknya, dan dipertukarkan bagiannya. Maka, bentuk di atas tidak dapat diganti menjadi *tidak bukan dan tidak lain*, tetapi harus bentuk idiomatis *tidak lain dan tidak bukan*.

Masih banyak bentuk kebahasaan lain yang dapat menunjukkan bahwa kita gemar mengabaikan aturan bahasa. Lalu siapa lagi yang akan merawat bahasa Indonesia dengan benar kalau bukan kita semua.

'Markus'

Oyos Saroso H.N.

Malang nian nasib Markus. Sejak persetujuan antara KPK dan Polri meruncing, muncul permukaan, dan gencar dipublikasikan media massa, reputasi nama Markus langsung jatuh.

Bayangkan, nama bagus yang mungkin menjadi kebanggaan pemilik nama Markus Stevanus, Markus Pambagyo, Johan Markus, atau Markus Girsang tiba-tiba memiliki konotasi buruk: Markus = makelar kasus. Mungkin saja para pemilik nama Markus kini sering menjadi bahan ledakan tetangganya atau tidak percaya diri lagi memiliki nama itu.

Saya tidak tahu persis siapa yang pertama memakai istilah *markus* untuk menunjuk pada orang yang berprofesi sebagai makelar kasus. Saya yakin, orang yang pertama memakai istilah itu dan--kita yang ikut-ikutan memopulerkannya--pasti mengabaikan perasaan orang yang kebetulan bernama Markus. Diyakini pula, kita yang ikut memakai istilah itu dan menerimanya tanpa kritik apa pun termasuk golongan pemakai bahasa yang "ingin gampang" saja.

Pembentukan akronim bahasa Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0543a/U/198, tanggal 9 September 1987, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Menurut aturan itu, pembentukan akronim hendaknya memperhatikan syarat-syarat: (1) Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia, ((2) Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim.

Dalam kasus kriminalisasi KPK atau KPK versus Polri, *markus* adalah akronim. Per definisi, akronim berarti singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Sebagai akronim, *markus* mudah diucapkan dan dihafal. Namun, saya menemukan ada "kejanggalan": kalau mengambil masing-masing suku kata dari frase *makelar kasus*, kenapa akronimnya tidak menjadi *maksus*, *masus*, *makas*, *larsus*, atau *larkas*?

Jika diperikan, pemerian kata *markus* adalah sebagai berikut: mar= makelar, kus= kasus. Dengan pemerian seperti itu, menurut saya *maksus*, *masus*, *larsus*, atau *larkas* lebih berterima dibanding *markus*. Dalam konteks inilah, sekali lagi saya ingin memperjelas kecurigaan saya bahwa pembentukan akronim *markus* untuk menyebut *makelar kasus* sebagai sebuah tindak mencari gampangnya saja.

Kasus serupa terjadi pada akronim *Moka* untuk menyebut *Mal Kartini*, yaitu sebuah mal yang berdiri gagah di Jalan Kartini, Bandar Lampung. Menyebut *Mal Kartini* jelas sudah benar (jadi bukan *Kartini Mall*). Namun, menyingkat nama *Mal Kartini* dengan akronim *Moka* jelas sebuah salah kaprah bin *ngawur*. Akan lebih masuk akal kalau *Mal Kartini* akronimnya menjadi *Malkar*, *Malni*, atau *Maltin*.

Lagi-lagi, saya juga kesulitan untuk melacak orang pertama membuat akronim *Moka*. Untunglah tidak semua orang mau menerima begitu saja akronim itu. Setidaknya saya masih sering menemukan ada media cetak yang menulis *Mal Kartini* secara lengkap: Mal Kartini. Jelas, ini jauh lebih baik ketimbang menyebarkan salah kaprah yang dianggap benar.

Memang, tak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat akronim. Namun, kalau kita masih mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kita, seyogianya kita tidak seenaknya sendiri membuat akronim. Jangan lantaran ingin agar akronim itu terdengar gagah kemudian kita mengabaikan aturan.

Polri termasuk lembaga yang gemar membuat akronim. Pencurian dengan pemberatan diakronimkan menjadi *curat*, pencurian dengan kekerasan disebut *curas*, resepsi dan kriminal menjadi *reskrim*. Tak kalah "hebatnya" adalah para jurnalis. Saking malasnya menulis anggota legislatif mereka memperpendek menjadi *aleg*, unjuk rasa menjadi *unras*, uang palsu menjadi *upal*, kendaraan dinas menjadi *randis*, dan amanat presiden menjadi *ampres*. Orang asing yang baru belajar bahasa Indonesia dijamin bakal pusing membaca taburan akronim di koran.

Mungkin fenomena banjir akronim merupakan bentuk lain dari kreativitas anak bangsa, individu atau kelompok. Ini, misalnya, tampak pada akronim *Larasita* 'Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah', *Jaring Asmara* 'Penjaringan Aspirasi Masyarakat', *Gerbang Kertasusila* 'Gresik, Bangkalan, Kertosono, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan', *Jabodetabek* 'Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi'. Namun, di sisi lain banjir akronim justru bisa menyebabkan kepala pusing.

Pemakaman atau Permakaman?

Ninawati Syahrul, M.Pd.

Ketika saya dan sahabat saya hendak berziarah ke makam salah satu teman kami yang baru saja meninggal, sahabat saya itu bertanya, "Apa nama kompleks pemakamannya?". Saya menjawab singkat, "kompleks pemakaman Andrawina!"

Maklum, sahabat saya itu memang belum pernah mengerti kompleks makam dekat perumahan saya. Dari cerita tersebut, saya yakin pemakaian bentuk *pemakaman* dan *permakaman* telah dirancukan. Sebagian pemakai bahasa pasti mengatakan *kompleks pemakaman* atau *tempat pemakaman* sebagai bentuk lain *kuburan* atau *makam*.

Dalam ilmu bahasa, makna imbuhan gabungan atau konfiks per-an adalah 'hal yang berkaitan dengan bentuk dasarnya'. Maka, makna per-an pada *permakaman* adalah 'hal yang berkaitan dengan makam'. Agaknya selama ini bentuk kebahasaan itu selalu dikacaukan dengan makna *pemakaman*, yang sesungguhnya sama sekali tidak menunjukkan pada tempat makam atau kuburan. Akan tetapi, karena bentuk bahasa itu banyak digunakan orang dan sudah lama digunakan jadilah bentuk salah kaprah itu digunakan di setiap kesempatan.

Adapun konfiks pe-an seperti pada *pemakaman* maknanya adalah 'cara, perbuatan, atau proses yang tampak dari bentuk verba me-'. Jadi, bentuk *pemakaman* tidak dapat dipahami sama sekali sebagai 'kompleks permakaman' atau 'empat memakamkan' atau 'kompleks makam' tetapi harus dimaknai sebagai 'aktivitas perbuatan memakamkan' atau 'cara memakamkan' atau 'proses memakamkan'.

Analogi yang bisa digunakan untuk memperkuat kebenaran bahwa bentuk permakaman mengacu pada 'kompleks atau tempat makam' adalah bentuk *persawahan*, *perkebunan*, dan *perikanan*. *Persawahan* dimaknai sebagai 'hal yang berkaitan dengan sawah'. Bentuk *perkebunan* adalah 'hal yang berkaitan dengan kebun'. Demikian pula dengan *perikanan* pasti maknanya adalah 'hal yang berkaitan dengan ikan'. Jadi, tidak bisa kita menyebutkan *pesawahan*, *pekebunan*, dan *peikanan* tetapi *persawahan*, *perkebunan*, dan *perikanan*.

Bentuk salah kaprah yang lain yang berkaitan dengan *permakaman*, tetapi sepertinya sulit dibetulkan adalah *pedesaan*. Banyak orang menyebut

wilayah pedesaan atau *daerah pedesaan*. Bukankah makna pe-an berbeda sekali dengan per-an disebutkan di atas. Jadi, kalau disepakati bahwa konfiks per-an adalah ‘hal yang berkaitan atau hal yang disebutkan pada bentuk dasar’, bentuk yang mestinya digunakan adalah *perdesaan*.

Selama ini tidak pernah muncul bentuk salah yang menjadi pembandingan yakni *pekotaan*, tetapi yang muncul adalah *perkotaan*. Maka, bentuk yang benar pasti juga *perdesaan*. Sama halnya dengan *pemukiman*, yang selama ini banyak dimaknai secara salah sebagai ‘hal yang berkaitan dengan tempat tinggal atau mukim’, sekarang harus dimaknai sebagai ‘aktivitas atau kegiatan memukimkan’. Jadi, *pemukiman warga miskin* tidak dapat dimaknai sebagai ‘tempat mukim bagi warga miskin atau ihwal mukim bagi warga miskin’, tetapi harus dimaknai sebagai ‘proses memukimkan warga miskin atau aktivitas memukimkan warga miskin’.

Berkenaan dengan keterangan di atas, kesalahkaprahan yang terjadi dalam pemakaian bahasa Indonesia, harus sesegera mungkin dibetulkan, agar tidak menjadi salah kaprah yang akhirnya justru kian menyulitkan. Semoga kita dapat membetulkan kesalahkaprahan bentuk-bentuk kebahasaan ini.

Merangsek dan Keteteran

Adian Saputra

Salah seorang rekan kami di Kompartemen Bahasa harian ini, Susilowati namanya, menemukan bahwa kata *merangsek* belum ada dalam kamus terbaru. Padahal kata ini jamak dipakai media, termasuk Kompas. *Merangsek* itu menunjukkan verba yang bermakna masuk, menyerang, ofensif, mungkin juga penetrasi.

Bisa dikatakan, *merangsek* ini galib dipakai jurnalis, penulis, dan editor di media mereka bekerja. Sebab itu, sungguh heran kalau *merangsek* ini tidak diakomodasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Selain *merangsek*, kata yang umum tapi tak dimasukkan ke dalam kamus ialah *keteteran*. Kami mengetahuinya setelah seorang redaktur koran ini bertanya apakah *keteteran* sudah ada di kamus. Berhubung sudah sering dipakai, kata ini kami terima sebagai bentuk yang sudah umum dipakai. Namun, lagi-lagi, kata ini ternyata belum masuk dalam kamus. Kata asal *teter* memang ada, tapi maknanya tidak tepat.

Keteteran yang umum dipahami oleh pembaca ialah suatu kondisi keterdesakan, mendekati kekalahan, dan yang serupa dengan itu. Contoh dalam kalimat *AC Milan keteteran menghadapi gelombang serangan pasukan Setan Merah* atau *Polda Lampung keteteran menghadapi maraknya pembegalan di jalan lintas Sumatera*.

Dalam beberapa tulisan yang lalu di rubrik ini, saya menulis *belantika* yang juga tidak masuk dalam kamus. Kini kami menemukan dua kata lagi yang berasib serupa.

Tentu ini sangat mengherankan. Kata yang umum dipakai masyarakat tidak dimasukkan, sedangkan kata yang masih asing malah diakomodasi. Rasanya memang janggal kata *stroke* dalam bahasa Inggris berubah menjadi *strok*. *Fans* menjadi *fan*. Yang lucu *chaos* menjadi *kaos*.

Urusan berbahasa memang bergantung penerimaan masyarakat. Otoritas kebahasaan yang mengaturnya, memberikan bakuan tata cara berbahasa lisan dan tulisan. Yang harus ditemukan ialah kesesuaian antara yang baku dan akrab dipakai masyarakat. Idealnya memang seirama. Soal *jemawa* yang baku menjadi *jumawa* dalam bahasa lisan; tentang *semringah* yang baku menjadi *sumringah*; perihal *ketilang* yang baku menjadi *kutilang* di lisan kita; okelah masih nyambung. Namun, kalau *gadget* yang punya arti

perkakas dimasukkan tanpa perubahan sehuruf pun, wow luar biasa. Padahal kata itu masih asing dan belum akrab diujarkan masyarakat kita. Bagaimana Pusat Bahasa?

Saling Ketergantungan

Fadhilatun Hayatunnufus

"Ditanya soal masih perhatiannya Nana pada Imam yang notebene mantan suami, Nana mengatakan bahwa sebetulnya mereka saling ketergantungan. Namun karena keadaan Imam yang tidak bisa dikendalikan, dirinya memutuskan pisah."

Begitulah kata-kata yang diucapkan selebritas kita Nana Mardiana yang saya dengar di sebuah acara televisi. Salah satu tuturan yang diucapkan oleh selebritas tersebut adalah kata *saling ketergantungan*. Sepintas tidak ada yang salah dengan kata *saling ketergantungan*, tetapi coba kita perhatikan kembali apakah kata *saling ketergantungan* merupakan sebuah tuturan yang benar untuk diucapkan.

Dalam KBBI (985: 2001) kata *saling* berarti kata untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Kata *saling* juga dapat berarti bentuk bahasa yang menunjukkan makna timbal balik atau berbalas-balasan (bersambut-sambutan atau dari dua belah pihak). Contohnya dalam kalimat *Dalam hidup beragama kita harus saling menghargai*.

Kata *ketergantungan* bermakna (hal) perbuatan tergantung, perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain, seseorang, badan, dan sebagainya yang belum dapat mandiri. Contoh dalam kalimat *Sammy mengatakan bahwa ia baru sekali memakai sabu-sabu dan belum ketergantungan*. Kata *ketergantungan* tergolong dalam kelas kata benda (nomina). Kata yang sejenis itu misalnya, *keterkaitan* dari kata *kait* (nomina).

Kata *saling* lazimnya dipadankan dengan kata kerja yang menyatakan tindakan/perbuatan, proses, gerak, keadaan atau terjadinya sesuatu, misalnya, saling memeluk, saling memukul, saling meninju, saling memasuki, saling menyakiti, saling menghormati, saling menghargai, saling melihat, saling membagi, saling memberi, saling menafkahi, dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengar atau melihat kata *saling* yang dipadankan dengan kata benda.

Apabila kita menambahkan kata *saling* di depan kata benda, pasti kata-kata itu menjadi rancu. Tidak pernah ada kata *saling ketergantungan*. Akan tetapi, selama ini kita masih sering melihat dan mendengar kata *saling ketergantungan* yang dituliskan ataupun diucapkan. Seharusnya kata *saling ketergantungan* tersebut diubah menjadi *saling bergantung*.

Dalam morfologi kata bergantung tergolong kelas kata kerja yang bermakna (1) bersangkutan atau berkait pada sesuatu yang lebih tinggi, (2) berpegang, (3) menyandarkan diri kepada, (4) terikat pada (kekuasaan, kemauan, keadaan, dll).

Nah, dengan begitu kata *bergantung* yang pantas disandingkan dengan kata *saling* karena kata *bergantung* tergolong kelas kata kerja (verba), bukan kata *ketergantungan* yang tergolong kata benda (nomina).

Selain kata *saling ketergantungan* yang salah dalam penggunaannya, ada juga kata *saling pengertian*. Kata pengertian dalam KBBI berasal dari kata dasar *erti* atau *arti* yang maknanya adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran atau pemahaman.

Contohnya dalam kalimat *Orang tua itu dengan sabar menanamkan pengertian tentang norma-norma agama kepada anak-anaknya*. Kata *pengertian* tergolong dalam kelas kata benda (nomina) sama dengan kelas kata dasarnya, *erti* atau *arti*.

Seharusnya kata *saling pengertian* tersebut diubah menjadi *saling mengerti* yang tergolong kelas kata kerja yang bermakna (telah dapat) menangkap (memahami, tahu) apa yang di maksud oleh sesuatu atau paham karena kata *saling* lazimnya dipadankan dengan kata kerja. Jadi jika selama ini kita menggunakan kata *saling pengertian* sebaiknya diubah menjadi *saling mengerti*.

Sup Buah dan Pindang Baung

Ratih Rahayu

Setelah makan siang, biasanya kami menutupnya dengan makan sup buah. Sup buah adalah potongan beraneka jenis buah-buahan yang diberi kuah campuran air gula atau sirop dan susu. Buahnya terdiri dari apel, anggur, semangka, melon, lengkeng, alpukat, mangga, dan lain sebagainya. Segar sekali rasanya bila dicampur es dan dinikmati di siang hari yang panas.

Sebelum banyak pedagang sup buah di pinggir jalan, banyak yang bertanya-tanya tentang apa itu sup buah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *sup* berarti masakan berkuah dari kaldu yang diberi bumbu pala, lada, dan sebagainya. Jenis sup yang selama ini kita kenal adalah sup ayam, sup jagung, dan sup buntut. Mungkinkah buah-buahan dimasak dengan kaldu yang diberi bumbu lada dan pala? Kalau gulai ikan dicampur dengan potongan buah nanas sepertinya sudah sering didengar dan dicicipi. Tapi kalau aneka buah-buahan dimasak menggunakan bumbu pala dan lada, sepertinya aneh.

Sup buah adalah salah satu contoh perluasan makna kata *sup*. Walaupun tidak berbumbu lada dan pala, campuran potongan aneka buah yang diberi kuah gula atau sirop dan susu diberi nama sup buah. Mungkin letak persamaannya adalah sama-sama berkuah.

Kalau logikanya hanya karena sama-sama berkuah, mungkin di masa yang akan datang semua yang berkuah akan dinamai dengan sup.

Selain masalah bumbunya, jenis penulisan sup yang ada di gerobak penjual sup buah membuat saya tersenyum. Ada yang menuliskan sop buah, soup buah, dan shop buah. Untung saja tidak ada yang menuliskannya dengan kata soap buah.

Seperti halnya sup buah, ada satu jenis masakan lain yang terkadang membuat orang (khususnya non-Sumatera) bertanya-tanya, yaitu pindang ikan (baung atau patin). Di Bandung, di tempat asal saya, pindang adalah sejenis ikan yang diawetkan dengan cara dibumbui garam dan direbus.

Sejalan dengan apa yang saya tahu, pindang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ikan yang digarami dan dibumbui kemudian diasapi atau direbus sampai kering agar dapat bertahan lama. Pindang yang dikenal di sini (terutama Lampung dan Palembang) adalah sayur ikan berkuah yang

dibumbui dengan beraneka bumbu dapur dan ditaburi daun kemangi. Sangat berbeda artinya bukan?

Menurut Mansoer Pateda (1995), sebuah kata maknanya bisa meluas disebabkan oleh perkembangan pemikiran pemakai bahasa. Menurut dia, yang terpenting kita tetap melihat keterkaitan makna dasar atau makna semula. Bila sup buah dapat dikaitkan dengan sama-sama berkuah, bagaimana dengan pindang? Apa keterkaitan *pindang* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian yang ada di masyarakat (Lampung dan Palembang)? Saya tidak berani menerka-nerka jawabannya. Yang pasti hal ini dapat menjadi pekerjaan rumah bagi ahli bahasa untuk menelitinya.

Semoga pemikiran saya tentang sup buah dan pindang baung dapat menambah kaya wawasan kebahasaan.

LoL atau Tertawa Lepas

Oyos Saroso H.N.

Di sebuah blog, seorang menulis: "Wah, roti buatanmu ini terasa enak sekali....Benar-benar roti rasa Brad Pitt! LoL...." Sementara di jejaring sosial *Facebook*, seorang pemilik akun menulis: "Memang benar kata orang, sejahat-jahatnya ibu tiri tidak sejahat ibu kota. LoL...."

Kata *LoL* memang bertebaran di dunia maya, terutama di beberapa jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Nellog*, *Friendster*, dan lain-lain. Kata *LoL* 'laugh out loud' muncul terutama saat dua orang sedang mengobrol (*chat*) atau ketika pemilik akun dan teman-temannya mengomentari sebuah status.

Menurut kamus *Webster's*, *LoL* merupakan akronim untuk 'tertawa keras' (*laughing out loud*), 'banyak tertawa' (*lots of laughs*), dan banyak cinta (*lots of love*). *LoL*, menurut *Webster's*, merupakan bahasa slang di dunia maya yang biasa digunakan untuk mengungkapkan hiburan umum atau berbagai macam emosi sesuai dengan konteks subkultural.

Di dunia maya, *LoL* lebih sering dipakai untuk mengungkapkan emosi tertawa lepas atau tertawa terbahak-bahak. Sebagai bahasa slang, pemakaian kata *LoL* tentu saja sah-sah saja. Pemakaian kata *LoL* tentu tidak begitu jadi masalah jika si penutur memang memakai bahasa Indonesia. Namun, akan terasa sangat janggal ketika penutur bahasa Indonesia seperti contoh kalimat pada awal tulisan ini.

Dengan latar belakang budaya Indonesia dan menulis dengan bahasa Indonesia, komentar di sebuah blog dan status seorang pemilik akun di *Facebook* di atas akan lebih berterima dan lebih "membumi" jika langsung kan menjadi *Ha...ha...ha...* atau *He...he...he.....*. Apalagi, jika si penutur tidak paham arti *LoL* alias memakai kata *LoL* sebagai latah semata.

Selain disebabkan ketidaktahuan penutur bahasa tentang arti kata *LoL*, pada titik tertentu pemakaian kata *LoL* di dunia maya oleh penutur berbahasa Indonesia merupakan salah satu gejala alih kode (*code switching*) atau peralihan dari satu kode ke kode lain. Pada titik lain, pemakaian kata *LoL* juga lebih sebagai bentuk latah. Mungkin saja biar seseorang dianggap "lebih gaul" atau lebih modern. Ini terutama bagi para pengguna internet yang sama sekali tidak tahu makna *LoL*.

Perkembangan luar biasa di bidang teknologi--yang umumnya berasal dari negara maju--menyebabkan gejala alih kode tidak bisa dihindari. Sebab, memang banyak istilah teknologi yang berasal dari bahasa asing dan sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Atau, bisa jadi, padanan kata dalam bahasa Indonesia terasa kurang “enak dan nyaman” dipakai ketimbang bahasa aslinya.

Alih kode merupakan salah satu bentuk ketergantungan bahasa (language dependency) dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat multibahasa sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Dalam alih kode masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Persoalannya, lagi-lagi, pada masalah penguasaan dan budaya: benarkah seseorang yang melakukan alih kode menguasai dua bahasa atau lebih dan apakah dia memahami konteks bahasa itu dengan benar?

Dalam praktek berbahasa sehari-hari yang berkaitan dengan internet, kita acap lebih nyaman dan gagah memakai kata *download* ketimbang *unduh*, *upload* daripada *unggah*, *update* daripada *pemutakhiran*, *attachment* ketimbang *lampiran*, *bandwidth* ketimbang *lebar pita*, *browser* ketimbang *peramban*, *chatting* ketimbang *mengobrol*. Bahkan, di luar dunia maya, kita sering lebih suka memakai *OTW (on the way)* ketimbang *sedang dalam perjalanan* atau *BTW (by the way)* daripada *omong-omong*.

Berbahasa yang benar berarti praktek berbahasa yang sesuai dengan konteksnya. Kita berharap gejala alih kode yang begitu marak tidak benar-benar menjadikan orang Indonesia lebih menyukai *LoL* ketimbang *tertawa lepas* tanpa tahu makna dan konteksnya. Apalagi membuat kita benar-benar seperti orang (to-) lol.

Etika Berbahasa

Mamad Ahmad

Bahasa merupakan perkataan-perkataan yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan situasi dan komunikasi yang menggunakannya.

Perilaku berbahasa seseorang dapat dijadikan tolok ukur keberadaban suatu bangsa. Pepatah mengatakan bahasa adalah cerminan pribadi seseorang, karena melalui tutur kata kita dapat menilai pribadi seseorang.

Tutur kata yang baik, lemah lembut, dan sopan-santun yang dilakukan seseorang mencerminkan sebagai pribadi yang baik dan berbudi. Sebaliknya, apabila perkataan seseorang buruk, citraan buruklah yang akan melekat kepada pribadi orang tersebut.

Kenapa demikian? Karena bahasa juga dapat menjadi alat kekerasan verbal yang terwujud dalam tutur kata seperti memaki, memfitnah, menghasut, menghina, dan lain sebagainya. Hal itu akan berdampak negatif terhadap perilaku seseorang seperti permusuhan, perkelahian, aksi anarkisme, provokasi, dan sebagainya.

Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal eufemisme yaitu gaya bahasa pelembut dengan cara menggantikan kata-kata dengan kata lain yang lebih sesuai dan tidak menyinggung perasaan. Contohnya dalam kalimat *Di mana tempat kencingnya?* diganti dengan *Di mana kamar kecilnya?*. Kata *tempat kencing* (dalam bahasa sehari-hari biasa juga disebut WC) tidak cocok jika akan digunakan untuk percakapan di muka umum karena terkesan vulgar.

Kita tahu, sebagai apa pun, WC tetap berkonotasi jorok. Kata *kamar kecil* dapat menggantikannya. Kata *kamar kecil* ini konotasinya lebih sopan daripada kata *tempat kencing*. Jadi, dalam eufemisme terjadi pergantian nilai rasa dalam percakapan dari kurang sopan menjadi lebih sopan.

Beberapa waktu yang lalu santer perdebatan mengenai kasus *bai out Bank Century*. Ada anggota DPR yang notabene terhormat sering menggunakan intonasi yang tinggi sehingga terkesan saling mencaki-maki satu sama lainnya. Bahkan, Ruhut Sitompul dan Gayus Lumbuun dalam perang mulut menggunakan kata-kata yang tidak pantas (kasar) sehingga memberi kesan buruk bagi masyarakat.

Dalam bahasa Sunda, ada yang disebut dengan undak usuk bahasa (tingkatan) yang digunakan dalam komunikasi sesama pengguna bahasa.

Tingkatan tersebut meliputi, pertama, bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Kedua, bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan sesama/setara (usia). Ketiga, bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan yang lebih muda. Ketiga tingkatan itu merupakan tatanan yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena di dalamnya terdapat sebuah nilai norma yang mengikat.

Sejalan dengan hal itu, Allah berfirman dalam surat Al Qalam: 10-11, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi menghina. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah".

Demikian juga Rasulullah saw. bersabda (dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari), "Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya berkata baik jika tidak bisa lebih baik diam".

Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, "Orang yang disebut muslim adalah orang yang bisa menjaga tangannya dan lisannya." Sempurnanya ajaran Islam, etika dalam berbahasa pun diaturinya dengan lugas.

Anjuran di atas juga relevan dengan pepatah lama yang mengatakan bahwa lidah itu tak bertulang. Lidah itu memang lunak. Oleh karena itu, orang yang lemah pun bisa bersilat lidah. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Jika luka tersayat oleh pedang tidaklah susah untuk mengobatinya, tetapi kalau luka hati tersayat oleh kata-kata, hendak ke mana kita mencari penawarnya?

Begitupun dengan ungkapan mulutmu harimaumu--segala perkataan yang telanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Apalagi kata-kata itu berisi kebohongan yang dapat menimbulkan fitnah.

Peribahasa mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, menunjukkan begitu dahsyatnya kata-kata yang diucapkan sehingga lebih buruk dari menghilangkan nyawa sekalipun. Berapa banyak persaudaraan yang terputus karena tikaman lidah.

Sebagai bangsa yang beradab sudah semestinya kita menjaga perilaku berbahasa baik dalam situasi formal maupun informal yang mampu menciptakan suasana komunikasi yang baik sehingga mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Jilbab dan Kerudung

Ratih Rahayu

Sebagian besar umat Islam mengalami perubahan penampilan dan perilaku bila sudah memasuki Ramadan. Yang jarang muncul di masjid, tiba-tiba kita jumpai datang salat ke masjid. Bahkan, yang jarang memegang Alquran, sekonyong-konyong rajin membacanya.

Banyak perempuan yang pada awalnya tidak pernah menutup auratnya, mendadak tampil berjilbab atau berkerudung. Seperti halnya artis-artis yang sering muncul di media cetak dan elektronik. Biasanya mereka tampil dengan pakaian terbuka. Namun pada Ramadan mereka berbaju panjang dan tak lupa memakai jilbab atau kerudung.

Berkenaan dengan kata *jilbab* dan *kerudung*, sering orang mengartikan keduanya sebagai sinonim yang boleh saling menggantikan. Hal tersebut terbukti saat awak media cetak dan elektronik memberitakan salah satu artis yang tersandung kasus video porno. Saat artis perempuan itu datang ke kantor polisi menggunakan penutup kepala, ada sebagian media yang memberitakan artis itu berjilbab dan ada pula yang memberitakan bahwa artis itu berkerudung.

Sesungguhnya apa definisi *jilbab* dan *kerudung*? Apakah ada perbedaan antara keduanya? Seperti biasa, untuk mengetahui arti sebuah kata dalam bahasa Indonesia, kita harus merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam KBBI, *jilbab* berarti kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada, sedangkan *kerudung* berarti kain penutup kepala perempuan.

Dari pengertian di atas, dapat kita mengerti bahwa *kerudung* merupakan penutup kepala yang digunakan oleh perempuan. *Jilbab* sesungguhnya adalah salah satu jenis kerudung. Berarti, kerudung merupakan kata umum untuk penutup kepala perempuan dan jilbab merupakan kata khususnya. Lalu, adakah kata khusus yang lain untuk penutup kepala perempuan?

Setelah saya mencermati KBBI, saya menemukan kata *selendang* yang berarti kain (sutra dsb.) panjang penutup leher (bahu, kepala) atau untuk menari. Namun, perlu kita ingat bahwa kata *selendang* juga dapat berarti kain untuk menggendong. Salah satu pengertian kata *selendang* tersebut telah menjawab pertanyaan saya di atas.

Sebagai perempuan berkerudung, saya mengenal beberapa jenis penutup kepala lainnya, seperti *phasmina* dan *bergo*.

Pengertian yang saya ketahui di masyarakat, *phasmina* berarti sejenis selendang yang cukup lebar, sedangkan *bergo* adalah kerudung yang langsung pakai atau cara pemakaiannya tidak memerlukan peniti atau jarum pentul. Dahulu *bergo* itu khusus untuk nama kerudung yang bentuknya mirip mukena yang berukuran kecil. Namun, saat ini ada sebagian orang yang menyebut semua jilbab langsung pakai dengan sebutan *bergo*.

Apakah di kemudian hari kata *bergo* dan *phasmina* akan diakomodasi dalam bahasa Indonesia? Bagaimana pendapat pembaca setia rubrik Laras Bahasa? Perlukah kedua kata tersebut kita akomodasi? Penambahan kosakata dalam sebuah bahasa layak dilakukan bila memang dirasa perlu. Bila *phasmina* diserap dalam bahasa Indonesia, maka *phasmina* akan menjadi *fasmina*. Hal tersebut berlandaskan kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bagi unsur serapan *ph* akan berubah menjadi *f*. Mari kita tunggu kemunculannya kedua kata tersebut dalam KBBI.

Bahasa Kedua

Dian Anggraini

Jika Anda menonton film *Obama Anak Menteng* yang diputar di bioskop bulan lalu, mungkin perhatian kita tertuju pada pemeran Barry Soetoro atau Obama kecil. Sosok kecil pemeran presiden ke-44 Amerika itu sangat piawai berakting dan fasih berbahasa Inggris. Rasa penasaran itu membuat saya mencari tahu siapakah dia.

Hasan Faruq Ali, demikian namanya, berusia 14 tahun. Sekilas ia tak berbeda dengan anak-anak yang berasal dari Indonesia bagian timur. Berhidung besar, rambut keriting, dan berkulit gelap. Namun, dugaan saya salah. Hasan bukanlah orang Indonesia. Ia lahir di Questa, New Meksiko, Amerika Serikat, dari pasangan Shakur Ali (personel grup religi Debu) dan Naseem Nahid. Mengetahui biografi Hasan, saya tak heran bila ia pandai berbahasa Inggris.

Dalam acara Rossy yang tayang di salah satu televisi swasta 18 Juli 2010 lalu, saya kaget. Bukan karena kemampuan berbahasa Inggris Hasan melainkan ketidakmampuan Hasan berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Padahal, menurut pembawa acara Rosiana Silalahi, Hasan dan keluarga telah bermukim di Indonesia selama 10 tahun. Asumsinya, saat itu usia Hasan empat tahun.

Saya miris mendengar pengakuan Hasan itu. Ia menuntut ilmu, bergaul, makan, dan bahkan bernapas di sini tapi tetap saja tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Masyarakat kita tidak mampu menularkan bahasa Indonesia atau memang lingkungan sekitar tidak memberinya peluang. Ini berbanding terbalik dengan masyarakat kita yang sok *ninggris*. Baru satu tahun tinggal di negeri orang sudah lupa mengatakan *makan siang, lain waktu, sampai berjumpa*, dan lainnya.

Dalam *Hipotesis Umur Kritis (Crytical Age Hypotesis)* disebutkan seorang anak yang berumur di bawah belasan tahun, minimum 12 tahun, akan dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli (Lenneberg, 1967).

Proses literalisasi sendiri, menurut Krashen, terjadi saat anak berusia 4-5 tahun. Artinya, usia Hasan dari sejak pertama bermukim di Indonesia,

tepatnya di Makassar pada waktu itu, sudah bisa menerima bahasa Indonesia sama halnya persis dengan anak-anak kita.

Hasan mengungkapkan kelancaran berbahasa Indonesia mulai ia dapatkan selama syuting film yang berlokasi di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dalam tempo dua puluh satu hari ia bahkan sudah mengenal beberapa kosakata Betawi seperti *he eh*. Begitu cepatnya adaptasi tersebut karena didukung oleh lingkungan kerjanya.

Hasan adalah contoh kecil dari realitas. Betapa kita, begitu menjunjung tinggi bahasa “orang lain” tetapi bahasa kita justru dinomorduakan oleh pendatang. Kita lebih memilih berkomunikasi dengan bahasa pendatang, ketimbang pendatang yang harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kebiasaan ini sudah seharusnya kita ubah. Kita harus belajar pada negara lain yang bersikukuh mempertahankan bahasa nasionalnya ketimbang mengalah dan merendahkan jati diri.

Kita harus mencontoh negara lain. Jerman dan Prancis bisa menjadi panutan. Seorang teman yang telah menginjakkan kaki ke Jerman bercerita bangsa tersebut sangat menjaga jarak dengan sesuatu yang berbau Inggris. Film di bioskop didubing total dalam bahasa Jerman. Di toko buku, seksi buku bahasa Inggris ditempatkan di tempat yang terpencil, yang mesti dicari-cari ke pelosok toko. Termasuk dalam menjalin relasi dengan orang Jerman, jika mereka tahu kita berbahasa Jerman, mereka akan senang. Walaupun pas-pasan, tapi tidak masalah. Mereka tidak meminta kita untuk sempurna dalam menguasai bahasa mereka.

Orang Prancis pun sangat percaya diri terhadap bahasanya. Gambaran umum yang saya dapat malah mereka tidak mau bercakap bahasa Inggris. Seorang teman yang bertanya pada resepsionis Hotel Fiat, Rue de Douai, Paris dengan menggunakan bahasa Inggris tidak dijawab. Padahal, menurutnya, hotel tersebut berkelas. Resepsionis tersebut dengan percaya diri malah berkata, "*Vous etes a Paris, donc essayez de parler en Francais, s'il vous plait*". (“Anda di Paris, jadi cobalah untuk berbicara bahasa Prancis, silakan”).

Dari contoh itu kita belajar sesuatu yang berharga. Mereka merasa bangga menggunakan bahasa sendiri. Mereka juga merasa jati diri mereka terampas jika selalu menggunakan bahasa asing. Bahasa tentu menunjukkan nasionalisme. Jadi kapan kita bisa mendengar orang Indonesia mengucapkan “Selamat datang, Anda di Indonesia dan silakan berbicara bahasa Indonesia”.

Mengunduh Bahasa Daerah

Hesma Eryani

Dalam dunia media sosial yang membuat manusia hidup saling berjaringan, senantiasa dihubungkan atau terhubung antara satu dan lainnya oleh jaringan sistem komunikasi elektronik yang megah. Kita mengenal banyak kosakata baru yang mau tak mau harus diterima tanpa upaya untuk mengkritisinya.

Kosakata-kosakata itu datang dari perbendaharaan tata bahasa asing. Kita sangat tak akrab dengan kosakata-kosakata itu selama ini. Tapi, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sangat akrab dengan jejaring sosial itu, setiap kosakata yang kita dapat menjadi sedemikian akrab sehingga menjelma menjadi konvensi.

Bahasa pada akhirnya memang hasil konvensi sosial. Tidak jelas betul bagaimana bahasa dapat menjadi konvensi mengingat kesamaan persepsi, pemikiran, dan cara pandang sulit dicapai di antara manusia yang berasal dari ragam suku dan bangsa. Tiba-tiba saja kosakata seperti *upload* dan *download* yang berasal dari bahasa asing, membuat perbedaan suku dan bahasa daerah antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya menjadi lebur.

Kita menjelma menjadi masyarakat jejaring sosial dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang serupa atas makna dari istilah-istilah asing dalam dunia jejaring sosial.

Memang, para pengamat bahasa Indonesia acap menawarkan alternatif diksi atas istilah-istilah asing itu. Padanan setiap istilah asing dicari dalam kamus bahasa Indonesia, juga kamus-kamus bahasa daerah. Maka, secara perlahan-lahan kita menemukan kata *unggah* dipadankan dengan kata *upload*, dan *unduh* padanan dari kata *download*.

Kata *unggah* maupun kata *unduh* dipopulerkan oleh Pusat Bahasa. Kedua kata tersebut diambil dari perbendaharaan bahasa daerah. Dalam bahasa Melayu, kata *unggah* dan *unduh* dapat ditemukan. Makna kedua kata itu mirip dengan makna yang ditemukan dalam bahasa daerah seperti bahasa Sunda dan Jawa. Kata *unggah* bisa dimaknai dengan naik, sedangkan *unduh* bermakna turun.

Namun, pemakaian kata *unggah* untuk mengganti istilah *upload* mengalami perluasan makna jika dipergunakan dalam dunia jejaring sosial. *Unggah* dalam hal ini tidak hanya berarti naik, juga berarti menampilkan. Jika makna *unggah* merupakan menampilkan, kata *unggah* yang dikedepankan

sebagai padanan *upload* mengacu pada kata *munggah* yang dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari di sejumlah daerah.

Dalam bahasa Sunda, misalnya, ada istilah *munggah* yang mengacu pada kegiatan tradisi masyarakat. Sering kata *munggah* diberi akhiran -an menjadi *munggahan*, seperti pemakaian akhiran -an pada kata *maulud* (kelahiran) menjadi *mauludan*. Jadi, kata *munggah* atau lebih sering dipakai masyarakat Sunda dengan *munggahan*, sesungguhnya lebih tepat sebagai padanan kata *upload* yang berarti menampilkan.

Begitu juga halnya dengan kata *unduh*. Kata ini acap dipergunakan dalam masyarakat Jawa untuk menggambarkan kegiatan menurunkan buah dari pohon. Dengan begitu, pemakaian kata *unduh* sebagai padanan kata *download* dalam jejaring sosial merupakan perluasan makna kata.

Unduh tidak sekadar bermakna menurunkan, juga berarti mengeluarkan. Kata *unduh* dipakai untuk kegiatan mengeluarkan data dari dalam jaringan internet.

Kedua kata dari bahasa daerah ini belakangan menjadi konvensi masyarakat dalam jejaring sosial dari lingkungan budaya mana pun mereka berasal. Pepadanan kata *unggah* dan *unduh* itu menunjukkan betapa khazanah bahasa-bahasa daerah sangat kaya dan potensial menjadi padanan dari setiap istilah baru. Ketimbang memakai istilah-istilah baru dan asing, dan menjadikannya konvensi dalam berbahasa Indonesia, lebih baik kita memasyarakatkan istilah-istilah yang ditemukan dalam khazanah bahasa daerah melalui perluasan-perluasan makna.

Dalam berbahasa, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah sebuah bangsa. Tidak seperti negeri jiran Malaysia yang mengaku hebat, tetapi longgar dalam peristilahan bahasa sehingga bahasa nasional mereka lebih mirip dengan gado-gado.

Pemecahan Masalah?

Tri Wahyuni

Bahasa merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Pertumbuhannya mengiringi laju peradaban sebuah bangsa. Entah karena asyik atau karena lalai, bahasa yang dipakai dalam masyarakat sering mengabaikan unsur logika. Dengan dalih yang penting saling mengerti, logika bahasa "diperkosa" sedemikian rupa sehingga kehilangan alurnya, keluar dari relnya. Banyak contoh penggunaan bahasa yang cenderung salah kaprah, seolah-olah masyarakat kita ini sudah sangat akrab dengan kesalahkaprahan. Sesuatu yang salah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Kosakata bahasa Indonesia banyak diperkaya dengan kata-kata serapan dari bahasa daerah yang ada di Indonesia dan bahasa asing. Proses pengayaan ini juga melalui beberapa jalan, di antaranya ialah proses pemadanan kata dan proses penerjemahan dari bahasa asing.

Seperti kita ketahui, banyak faktor yang mendasari masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah penjajahan dan penyebaran agama ke wilayah nusantara ini. Salah satu contoh pengayaan khazanah bahasa Indonesia adalah dengan cara menerjemahkan bahasa asing (dalam hal ini bahasa Inggris) ke bahasa Indonesia.

Di antara kita tentu pernah mendengar pemakaian frasa *pemecahan masalah*. Apakah pemakaian frasa itu sudah tepat? Frasa pemecahan masalah adalah bentuk terjemahan dari *problem solving*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bentuk dasar kata *pemecahan* adalah *pecah* yang berarti (1) terbelah menjadi beberapa bagian, (2) retak atau rekah, (3) rusak atau belah kulitnya, (4) menjadi cair atau bergumpal-gumpal, (5) bercerai-cerai; tidak kompak, (6) tersiar, (7) mulai, (8) kalah, (9) sember, (10) bubar, usai, (11) terkalahkan.

Dari semua definisi itu dapat disimpulkan bahwa *pecah* berarti terbelah menjadi bagian-bagian kecil, seperti gelas yang apabila dibanting, maka akan pecah dan akan terbagi menjadi kepingan-kepingan kecil yang banyak jumlahnya. Itu artinya, ketepatan penerjemahan *problem solving* menjadi *pemecahan masalah* itu perlu dikaji ulang.

Pemecahan masalah bisa dikatakan tidak tepat karena dapat diartikan bukan membuat masalah menjadi beres, melainkan malah membuat sebuah masalah menjadi masalah-masalah kecil yang lain dan berjumlah banyak.

Secara semantis, makna *problem solving* adalah mencari jalan keluar penyelesaian sebuah masalah. Jadi, akan lebih tepat apabila *problem solving* diartikan sebagai *penyelesaian masalah* bukan pemecahan masalah. Seandainya logika dipakai untuk mengejawantahkan sebuah bahasa tentu syahdu sekali dirasakan. Kalau sebuah masalah justru malah terpecah menjadi beberapa bagian, maka pantas saja banyak masalah di negara kita ini yang tak tuntas dan justru malah menjadi masalah-masalah yang lain.

Kehati-hatian, ketelitian, dan kekreatifan seorang penerjemah sangat dituntut untuk menghasilkan sebuah terjemahan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menjembatani sebuah informasi kepada khalayak. Apabila terjadi kesalahan sedikit saja dalam menerjemahkan sebuah kosakata yang merupakan sebuah unsur serapan, akan fatal akibatnya.

Kepekaan seorang pembaca juga dibutuhkan untuk menghasilkan hubungan timbal balik yang romantis sehingga tercipta kondisi berbahasa yang berjiwa. Lalu, masihkah kita akan memecahkan masalah? Atau, hendak menyelesaikannya dengan tuntas.

Seiring perkembangan zaman, banyak kosakata atau istilah-istilah baru yang bermunculan dalam masyarakat khususnya dalam pergaulan para remaja ABG (anak baru gede) yang menyebut diri mereka sebagai anak gaul. Para remaja terkadang banyak menciptakan kosakata atau istilah-istilah baru yang biasanya disebut sebagai bahasa gaul. Kosakata atau istilah-istilah baru itu umumnya disosialisasikan oleh remaja.

Istilah itu mungkin muncul dari salah satu di antara mereka kemudian digunakan oleh teman-temannya dan selanjutnya menyebar ke mana saja. Kata itu menjadi semakin populer setelah digunakan oleh selebritas yang tampil di televisi dan juga ditulis dalam media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Selebritas di televisi ditonton dan media cetaknya dibaca oleh para remaja. Mereka menggunakan sendiri serta menularkan ke teman-temannya tetapi tak jarang para orang tua dapat memahami arti kata bahasa gaul yang digunakan para remaja atau bahkan para orang tua juga menggunakan bahasa gaul tersebut.

Kata-kata seperti *maksi*, *ja'im*, *ngeceng*, *nyokap*, *bokap*, *boring*, *bete*, dan sebagainya menjadi istilah yang muncul dari gejala muda. Saya sempat dibuat bingung juga ketika ngobrol kemudian melontarkan sebuah lelucon, tiba-tiba saya dibalang *jayus*. Waduh, saya tambah bingung karena tidak tahu arti kata *jayus* karena saya termasuk orang yang tidak gaul. Jika *jayus* itu sejenis minuman, pasti saya tahu karena *jayus* (*jasjus*) adalah minuman segar kesukaan saya.

Saya mencari arti kata *jayus* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tetapi saya tidak menemukannya. Akhirnya, saya membuka kamus *SMS IM3* yang isinya tentang istilah-istilah gaul para remaja dan saya menemukan arti kata *jayus*. Arti kata *jayus* dalam kamus tersebut adalah tidak lucu (kelakuan yang tidak lucu). Usut punya usut ternyata arti kata *jayus* tidak berbeda dengan *garing*. *Garing*? Bukan *garing* yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yang artinya keras dan kering (seperti biskuit). Akan tetapi, *garing* yang tidak lucu, istilah gaul yang dipakai oleh para remaja gaul.

Ada pula arti kata *jayus* yang saya dapat dari hadis Rasulullah saw. sebagai berikut: "Ada 10 golongan dari umatku yang tidak masuk surga, kecuali mereka bertobat. Mereka itu adalah *qala*, *jayus*, *qattat*, *dabub*, *dayus*, *shahibul artabah*, *shahibul khubah*, *utlul*, *zaniem*, dan *al aqliwalidaihi*.

Sahabatnya bertanya apa arti yang sepuluh tersebut. Rasulullah menjawab: (1) *Qala*, yaitu orang penjilat yang keluar masuk rumah pengusaha (pejabat pemerintah); (2) *Jayus*, ialah orang yang mencuri kain kafan dalam kubur; (3) *Qattat*, yaitu orang yang suka mengadu domba; (4) *Dabub*, yaitu orang yang mengelola perempuan-perempuan untuk pelacuran; (5) *Dayus*, yaitu orang yang tidak cemburu terhadap istrinya; (6) *Shahibul Arthabah*, yaitu orang yang kerjanya suka memukul gendang; (7) *Shahibul Khubah*, yaitu orang yang kerjanya memukul genderang; (8) *Uthul*, yaitu orang yang tidak mau memaafkan orang lain; (9) *Zaniem*, yaitu anak zina yang suka nongkrong di pinggir jalan dan menggunjing orang yang lewat; (10) *Al Aqliwalidaihi*, yaitu orang yang melawan kepada ibu dan bapaknya.

Nah, bagaimana? Setelah para remaja tahu arti kata *jayus* yang maknanya orang yang mencuri kain kafan di dalam kubur, apakah mereka mau dibilang jayus?

Kita (1)

Agus Sri Danardana

Secara konseptual, mungkin hanya bahasa Indonesia yang memiliki dua kata ganti orang pertama jamak: *kita* dan *kami*. Sama-sama sebagai kata ganti orang pertama jamak, secara spesifik *kita* berbeda dengan *kami*. Kita melibatkan semua komunikan: *saya* dan *kamu*, sedangkan *kami* hanya melibatkan komunikatornya: *saya* dkk. (jamak) dan minus *kamu*".

Oleh karena itu, orang Indonesia yang sudah lama menunggu (*check in*) di bandara akan menjadi heran ketika mendengar pernyataan: *We are a bit late* dari salah satu awak pesawat dalam memaklumkan keterlambatan terbangnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, "keunggulan" bahasa Indonesia itu terapresiasi secara beragam. Sebagian orang memperlakukannya secara sembarangan (mengacaukan pemakaian *kita* dan *kami*) karena ketidaktahuannya, sebagian lainnya justru memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Celakanya, untuk membedakan mana yang sembarangan dan mana yang mengandung kepentingan tidak dapat dilakukan secara mudah. Yang dapat dilakukan secara mudah hanyalah menduga dengan melihat siapa yang berbicara/menulis. Risiko salah duga, dengan demikian, terbuka lebar karena kemampuan berbahasa Indonesia pembicara/penulis pun beragam. Artinya, asumsi bahwa orang yang berpendidikan/berpengalaman memiliki peluang berkepentingan yang lebih tinggi daripada orang awam pun dengan mudah terbantahkan.

Perhatikan cuplikan dialog berikut ini. "Oleh sebagian orang, penangkapan Baasyir ini dianggap bermuatan politis. Bagaimana tanggapan Bapak?" tanya wartawan. Polisi pun menjawab, "Yang pasti kita sudah melakukan pemantauan atas sepak terjang tersangka sejak lama. Jadi, hal ini janganlah disangkut-sangkutkan dengan isu yang berkembang belakangan ini."

Penggunaan kata *kita* oleh polisi pada dialog di atas jelas salah. Seharusnya polisi menggunakan kata *kami*, sebagai kata ganti orang pertama jamak: institusi kepolisian. Pertanyaannya sekarang adalah disengajakah penggunaan kata *kita* dalam dialog itu? Jika tidak disengaja, dialog itu tidak bermasalah (kecuali masalah kesalahan bahasa) karena dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan (*kita* dianggap sama dengan *kami*).

Akan tetapi, jika disengaja, dialog itu pasti bermasalah. Mengapa? Karena dengan digunakannya kata *kita* berarti dapat diasumsikan bahwa yang melakukan pemantauan sepak terjang tersangka (Baasyir) bukan hanya pembicara (polisi), melainkan juga yang diajak bicara (wartawan).

Masalah yang hakiki tidak terletak pada benar atau tidaknya wartawan turut serta dalam pemantauan sepak terjang tersangka (Baasyir), tetapi terletak pada motivasi penggunaan kata *kita*. Di satu sisi, *kita* memang terdengar/terasa nyaman di telinga/hati dan seolah-olah dapat digunakan sebagai upaya menghaluskan tindak berbahasa. Ia (dalam hal ini polisi) tidak hanya melibatkan kelompoknya, tetapi juga melibatkan orang yang di luar kelompoknya (dalam hal ini wartawan) dan bahkan semua orang.

Kita (2)

Agus Sri Danardana

Masalah yang hakiki tidak terletak pada benar atau tidaknya wartawan turut serta dalam pemantauan sepak terjang tersangka (Baasyir), tetapi terletak pada motivasi penggunaan kata *kita*. Di satu sisi, *kita* memang terdengar/terasa nyaman di telinga/hati dan seolah-olah dapat digunakan sebagai upaya menghaluskan tindak berbahasa. Ia (dalam hal ini polisi) tidak hanya melibatkan kelompoknya, tetapi juga melibatkan orang yang di luar kelompoknya (dalam hal ini wartawan) dan bahkan semua orang.

Dengan demikian, praktis kata *kita* adalah sebuah konsep yang mendeklarasikan "tidak ada orang yang tidak terlibat", semuanya turut serta. Di sisi yang lain, kita dapat dijadikan tempat berlindung pihak-pihak tertentu (dalam hal ini polisi). Karena semuanya turut serta, jika terjadi kesalahan, kesalahan itu adalah kesalahan bersama: kita, bukan kami, apalagi saya.

Menurut Putu Wijaya, dalam rubrik Bahasa majalah Tempo dua tahun lalu, kata ganti *kita* telah menjadi senjata penetrasi: upaya penaklukan secara psikologis, taktis, dan sopan, tetapi agresif dan efektif. Sebagai akibatnya, sebuah pertempuran pun dapat dengan tiba-tiba mereda berkat kata *kita* karena di medan pertempuran tidak ada lawan lagi.

Begitulah, *kita* (sebagai kata ganti orang pertama jamak) tampaknya memang belum dipahami secara benar penggunaannya oleh sebagian masyarakat. Di samping sering dikacaukan dengan *kami*, *kita* juga sering dikacaukan dengan *saya* (kata ganti orang pertama tunggal) dan *kamu* (kata ganti orang kedua tunggal). Hal itu tampak pada kalimat (1) dan (2) berikut ini.

(1) Maaf, Pak, terlambat. Rumah kita jauh, Pak.
(2) Nama dan alamat sudah, lalu apa agama kita?

Kesalahan penggunaan *kita* pada contoh di atas tidak hanya mencerminkan adanya pengacauan penggunaan kata ganti orang, tetapi juga mencerminkan adanya pengacauan memusnahkan batasan antarindividu, tidak ada lagi kepentingan saya dan kamu. Yang ada hanyalah persoalan bersama, kita. Segala pertentangan dan perbedaan, dengan demikian, lenyap tak berbekas. Akhirnya, demokrasi pun akan mati dibuatnya.

Bahwa setiap bahasa memiliki kaidah dan kekhasannya sendiri, bisa jadi, sudah tidak terbantahkan. Dalam hal kata ganti orang pertama jamak, misalnya, ternyata bahasa Indonesia memiliki dua kata: *kita* dan *kami* yang secara konseptual berbeda cakupan maknanya. Sayang, kekhasan itu tidak

disyukuri (dengan menggunakannya secara benar), tetapi cenderung diabaikan, justru oleh kaum cerdas pandai yang seharusnya menjadi anutan pemakaian bahasa Indonesia.

Tidak jarang mereka melakukan "pemeriksaan" bahasa dengan memaksakan struktur bahasa asing (Inggris) ke dalam bahasa Indonesia. Di samping mengacaukan *kita* dan *kami* (agar sama dengan *we*), mereka juga sering memaksakan penggunaan kata tanya bahasa Indonesia: *di mana* dan *yang mana* (terjemahan leterlek dari *where* dan *which*) dalam kalimat berita. Pantaskah ulah mereka itu ditiru? Tidak dong. Salam.

Bahasa Persatuan

Ki Sanyoto

Indonesia sebagai bangsa sungguh beruntung memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dibandingkan Filipina, Malaysia, atau India, misalnya, kita lebih beruntung. Meskipun Filipina memiliki bahasa Tagalog, bahasa Tagalog hampir tidak mampu menjadi bahasa nasional. Malaysia punya bahasa Melayu, tetapi warganya lebih suka berbahasa Inggris. Begitu pula India.

Di Indonesia, perbincangan antarwarga di luar rumah, di tempat resmi, komunitas, dan lain-lainnya memakai bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa berdialog dengan warga setempat dengan bahasa Indonesia. Anak-anak kecil di daerah lebih banyak diajari berbahasa Indonesia oleh orang tuanya. Belanja di toko, pasar, dan mal, bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar.

Salah satu masalah yang kerap dibahas dalam perbincangan mengenai bahasa Indonesia adalah banyaknya akronim. Singkatan yang berbentuk kata tersebut sering disebut orang sebagai indikasi kondisi bahasa Indonesia belum solid. Akronim bisa menunjukkan sebuah bahasa belum praktis dalam menyampaikan suatu ide atau informasi, terlalu panjang dan ngelantur. Akhirnya dipilih jalan pintas: memendekkan bahasa menjadi kata. Pemendekan pun tidak memakai aturan baku. Bisa kombinasi kata di depan semuanya atau gabungan antara depan, tengah, depan. Ketika sudah berbentuk akronim, kadang orang pun lupa kepanjangan kata aslinya.

Contoh sederhana *kades*, akronim dari *kepala desa*. Jika mau ambil dari suku kata depan semuanya, tentu akronimnya *kedes*. Juga akronim *raskin* yaitu *beras miskin*. Tapi banyak orang terlalu bersemangat hingga menyebutkannya jadi *beras raskin*, alias *beras beras miskin*. Nah, yang miskin itu berasnya, apa yang menerima beras? Tampaknya unsur kenyamanan dalam pengucapan jadi pertimbangan pula.

Para ahli bahasa, sastrawan, jurnalis, praktisi media, guru, dan orang-orang yang banyak berhubungan dengan ruang publik merupakan penjaga garis depan kualitas berbahasa. Mereka punya andil besar dalam merusak, merawat, atau memperkaya bahasa Indonesia. Sulit membayangkan seandainya pembaca berita memakai bahasa Indonesia berantakan waktu siaran. Sulit pula membayangkan seandainya para sastrawan sengaja merusak bahasa Indonesia dengan memakai kosakata dan kalimat berantakan dalam karya sastranya.

Begitu pula para jurnalis menulis berita di korannya dengan kosakata berantakan. Dampak tindakan orang-orang yang berhubungan dengan publik seperti itu pasti luar biasa. Contoh sederhana istilah *secara* yang dipopulerkan kru radio. Versi mereka artinya ‘mengingat’, seperti dalam kalimat *secara masalah itu penting, perlu segera diselesaikan*. Padahal istilah *secara* artinya ‘dengan cara’. Para penyiar radio bermaksud mengembangkan menjadi istilah tersendiri. Maksud ini cukup berhasil di kalangan generasi muda.

Berkembang tidaknya bahasa Indonesia sesungguhnya tergantung peran media massa cetak dan elektronik, buku, tayangan televisi, spanduk, billboard, poster, dan lain sebagainya. Mereka bertugas menyebarkannya kepada umum.

Sebab itu, memang perlu langkah-langkah strategis bagi kalangan tersebut. Sekuat apa pun suatu komunitas menyebarkan sebuah kosakata baru dan tata aturan baru berbahasa, jika tidak pernah disebarakan kepada umum, tentu masyarakat tidak akan tahu. Jika tidak tahu, tentu tidak akan mengikuti.

Andil orang-orang yang biasa muncul di media juga perlu diarahkan. Tentu kita masih ingat, ketika Pak Harto memakai akhiran *ken* dalam berbicara, banyak pula pejabat mengikutinya. Namun, saat pemimpin negeri ini tidak memakainya, otomatis kebiasaan ini hilang.

Cendol dan Bata di Dunia Maya

Mamad Ahmad

Di era globalisasi saat ini, internet merupakan salah satu kebutuhan yang tak terelakkan. Hal ini terjadi karena fungsi internet yang sangat mendukung kebutuhan zaman. Segala sesuatu harus serba cepat. Internet merupakan sebuah solusi tepat untuk menjawabnya. Dengan perkembangan teknologi *website*, pengguna internet bisa membuat blog untuk menyimpan gagasan atau tulisannya dalam blog atau sekadar menuliskan komentar atas tulisan orang lain. Dari komentar atau gagasan yang tersimpan dalam media internet, tercipta sebuah interaksi sesama pengunjung situs tersebut. Interaksi ini lambat laun berkembang menjadi sebuah forum diskusi.

Ada prasyarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang ketika memasuki sebuah komunitas atau forum baru. Selain minat yang sama, calon anggota itu harus cepat beradaptasi dengan peraturan dan kebiasaan berbahasa yang berlaku. Salah satu kebiasaan berbahasa yang menjadi identitas sebuah situs adalah penggunaan jargon.

Tiap anggota dalam sebuah situs forum komunitas kerap menggunakan jargon yang hanya dimengerti oleh anggotanya. Dikutip dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jargon didefinisikan sebagai kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Jargon yang biasa digunakan para anggota forum dalam berinteraksi misalnya bata merah, cendol, dan (a) gan (juragan).

Cendol adalah penganan yang dibuat dari tepung beras yang dibentuk dengan penyaring, kemudian dicampur dengan air gula dan santan (*KBBI*). Jargon *cendol* berasal dari GRP (*good reputation point*) yang ditandai dengan kotak kecil yang berwarna hijau yang terletak di bawah avatarnya (gambar tiga dimensi yang digunakan untuk menggambarkan seseorang dalam dunia maya).

Warna kotak kecil hijau inilah yang mengilhami munculnya jargon *cendol*. Cendol di sini maksudnya adalah reputasi yang diberikan oleh satu anggota ke anggota lainnya. Makin tinggi reputasi seorang anggota di sebuah forum, makin dia dipercaya anggota lainnya. Dipercaya maksudnya sudah memiliki reputasi bagus seperti dalam hal menjual suatu barang di forum tersebut. Maka, segala tulisan akan makin banyak diminati dan kemungkinan orang untuk membeli barang yang dia tawarkan/jual akan makin tinggi.

Apa itu *bata merah*? Menurut *KBBI*, bata merah adalah tanah liat yang diaduk sampai halus, kemudian dicetak, dikeringkan, lalu dibakar. Yang

dimaksud *bata merah* di sini yaitu kebalikan dari cendol, identik dengan BRP (bad reputation point). Bata merah biasanya akan diberikan oleh anggota lain ketika seseorang berbicara jorok, kasar, berisi unsur SARA, atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan.

Penggunaan jargon *agan* biasa digunakan untuk memanggil anggota lain dengan tidak mengenal kasta sosial. Kata *agan* ini akan membuat interaksi mereka lebih akrab dan menimbulkan simpati dari anggota lain sehingga mampu mempercepat proses pembauran diri dalam komunitas tersebut.

Hal ini berbanding terbalik dengan pengertian *agan* (juragan) seperti yang tertulis dalam *KBBI*, yakni sebutan orang upahan terhadap majikan; tuan atau nyonya. Penggunaan jargon *agan* ini kerap digunakan di luar forum internet. Seperti di tempat-tempat umum dengan suasana informal seseorang sering menggunakan kata *gan* atau *sob* untuk memanggil temannya.

Kecenderungan penggunaan jargon ini dapat dipahami pula sebagai usaha seseorang untuk lebih cepat mengakrabkan dirinya dalam kelompok tertentu. Hal ini kerap dilakukan seseorang untuk mempermudah intergrasi/pembauran diri dalam sebuah komunitas.

Dampak Positif Penggunaan Kosakata Asing

Chairil Anwar

Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antarbahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

Penyerapan di sini dapat diartikan sebagai pengambilan unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk dibakukan dan digunakan secara resmi oleh pemakai bahasa Indonesia. Fungsi penyerapan bahasa asing sendiri adalah untuk memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia menjadi lebih beragam.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dunia luar, khususnya dunia barat, baik dari segi gaya hidup, *style*, sampai pada penggunaan bahasanya. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan sebuah fenomena di mana seseorang cenderung menggunakan kosakata-kosakata bahasa asing daripada bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa asing dalam masyarakat ada dua macam. Pertama adalah bahasa asing yang telah dibakukan oleh Pusat Bahasa, dan kedua adalah bahasa asing yang belum dibakukan.

Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata *atom*, *vitamin*, *unit* dsb., tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila pengguna bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa kita tercinta ini.

Dalam kenyataannya pengguna bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam kegiatan berbahasanya disebabkan dari beberapa faktor, antara lain gengsi, kebiasaan, pergaulan, gaya berbahasa agar terkesan “wah”, dsb. Jelas, alasan ini merupakan dampak yang negatif dan menjadi suatu ancaman bagi bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain ada dampak positif dalam penggunaan bahasa asing yang belum dibakukan ini terhadap kegiatan berbahasa secara umum.

Dampak positif itu berupa kemudahan dalam berkomunikasi antarsesama karena timbulnya suatu keadaan di mana kosakata bahasa asing dirasa lebih mudah dimengerti dan digunakan dalam komunikasi dibandingkan

dengan padanan dalam bahasa Indonesianya. Kenyataan yang timbul di lapangan terkait dengan penggunaan istilah asing ini adalah sebagai berikut.

Sering kita jumpai ujaran seperti ini: "Bu, adik ingin membeli snack yang rasa kentang itu". Dalam ujaran itu terdapat kata asing, yaitu kata *snack*. Kata itu merupakan istilah asing yang seolah-olah sudah menjadi bahasa Indonesia yang cenderung dipakai untuk merujuk kepada makanan ringan, padahal secara aturan kebahasaan ada padanan lain dalam bahasa Indonesia yang artinya semakna dengan kata *snack* tersebut. Kata itu adalah *kudapan*.

Namun, kata *kudapan* dalam kenyataannya lebih asing apabila dibandingkan dengan kata *snack* di telinga para pemakai bahasa Indonesia dan penggunaan kata *snack* dirasa cukup efektif dalam berkomunikasi daripada menggunakan kata *kudapan*. Masih banyak padanan kosakata bahasa Indonesia lainnya yang statusnya lebih asing di telinga dibandingkan kosakata dari bahasa asing.

Kesimpulannya, penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikkan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Namun, diharapkan adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing sehingga diharapkan kelak tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri.

Pemekaran Wilayah?

Kiki Zakiah Nur

Gejala salah kaprah dalam pemakaian bahasa Indonesia semakin sering terjadi. Sesuatu yang salah kaprah ini tampaknya dianggap sebagai sebuah kelaziman. Ironisnya, pejabat pemerintah yang merupakan panutan masyarakat justru juga sering salah kaprah dalam pemakaian bahasa Indonesia. Akibatnya, masyarakat meniru atau mengikuti kesalahkaprahan tersebut.

Banyak contoh yang sering ditemukan dalam pemakaian bahasa Indonesia yang salah kaprah. Salah satunya adalah frasa *pemekaran wilayah* yang akhir-akhir ini marak dibicarakan.

Pemekaran wilayah diartikan sebagai pembentukan daerah otonomi baru yang (salah satu) tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ada 7 provinsi, 135 kabupaten, dan 32 kota yang terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah. Contohnya adalah Provinsi Banten yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat atau Provinsi Kepulauan Riau yang juga merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau.

Lampung juga merupakan salah satu provinsi yang terbentuk dari hasil pemekaran Sumatera Selatan pada 1964. Provinsi Lampung sendiri juga mengalami pemekaran. Pada 1998, provinsi ini memiliki tujuh kabupaten/kota. Namun, sejak marak pemekaran wilayah, yakni tahun 1999, Lampung telah memiliki empat belas kabupaten/kota.

Lalu, apakah sebenarnya pemekaran wilayah itu? Apakah sudah tepat kata itu digunakan untuk menyebut suatu daerah yang dipecah atau dibagi menjadi beberapa bagian?

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa *pemekaran* berasal dari kata dasar *mekar*. Mekar berarti (1) menjadi besar dan gembung, (2) menjadi bertambah luas. Sementara *pemekaran* berarti proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar. Contoh kalimatnya adalah *pemekaran lahan persawahan dilakukan dengan membuat sawah-sawah baru di bekas tanah galan*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *pemekaran wilayah* berarti membuat sebuah wilayah atau daerah menjadi bertambah besar atau luas. Bertambah besar atau luasnya sebuah daerah tentu saja harus disertai dengan penambahan lahan sebagai pembatasnya.

Akan tetapi, pengertian yang muncul di masyarakat tidak seperti itu. Pemekaran wilayah yang terjadi adalah pemecahan atau pembagian sebuah wilayah menjadi beberapa bagian lagi. Akibatnya, bagian-bagian di dalam wilayah itu bertambah banyak. Misalnya adalah Provinsi Lampung yang sebelumnya memiliki tujuh kabupaten/kota kemudian dipecah lagi menjadi empat belas kabupaten/kota.

Jika konteksnya seperti itu, barangkali akan tepat disebut dengan *pemecahan wilayah*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *pemecahan* terbentuk dari kata dasar *pecah* yang salah satu maknanya adalah terbelah menjadi beberapa bagian. Pemecahan adalah proses, cara, perbuatan memecah atau memecahkan.

Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua tentu pernah berbuat salah, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa. Akan tetapi, hendaknya kesalahan yang terjadi tidak dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang sudah umum. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki andil untuk menciptakan dan memelihara keselarasan berbahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Dua Suku Kata

Febrie Hastiyanto

Kita sudah dikenal sebagai bangsa yang gemar bergosip, namun sering malas melafalkan kata-kata panjang. Akibatnya, kita menjadi bangsa yang efektif memenggal kata sesuka hati, sekaligus produktif menciptakan rupa-rupa akronim. Menariknya, pemenggalan kata dan akronim dilakukan untuk membentuk kata baru yang umumnya terdiri atas dua suku kata.

Coba tengok nama-nama kota di Indonesia. Kota-kota yang namanya tersusun lebih dari dua suku kata dipenggal semaunya. *Tanjung Karang* dan *Teluk Betung*, misalnya menjadi *Karang* dan *Teluk* dalam pelafalan sehari-hari. Berbeda dengan *Solo*, *Medan*, *Bandung*, atau *Kupang* yang terdiri dua suku kata sehingga dilafalkan utuh. Bisa jadi banyak anak-anak kita hari ini menganggap *Yogya* (dilafalkan *Jogja*) sebagai satu kata utuh lupa pada *Karta*, sebagai bagian integral identitas *Yogya*.

Tak hanya kota, nama seseorang yang terdiri lebih dari dua kata dipenggal, untuk efisiensi bercakap-cakap.

Bila tak dipenggal, apa boleh buat: terciptalah akronim. Dengan segera kita mengenal *Bandar Lampung* sebagai *Balam*. Nama jalan apatah lagi. *Jalan Jenderal Soedirman* menjadi *Jensu* atau *Jensud*. Di Kotabumi, *Jalan Gotong Royong* menjadi *Gotro*. Di Jakarta, *Jalan Otto Iskandardinata* menjadi *Jalan Otista*, *Bendungan Hilir* menjadi *Benhil*, tak jarang ditulis *Benhill*. Idiom-idiom yang membawa imaji kita pada nuansa barat, dan bule.

Identitas kota-kota kita bertabrak kata terpenggal atau akronim. *Bandara Soekarno Hatta*, melalui *running text* televisi, diakronimkan menjadi *Bandara Soetta*. *Bandara* sendiri merupakan akronim dari *bandar udara*, akronim yang dianggap anak-anak muda sebagai kata yang utuh. *Bandar udara* sebelum diakronimkan sebagai *bandara* dahulu disebut *pelabuhan udara*, diakronimkan menjadi *pelud*.

Lalu, adakah kaidah dari akronim dan pemenggalan kata? Saya kira pemenggalan kata tak ada kaidahnya. Namun, akronim jelas ada. Namun, tak sedikit orang beranggapan pembentukan akronim bersifat arbitrer alias berdasarkan kesepakatan pemakai bahasa itu sendiri. Golongan yang sepakat pada epistemologi arbitrer berpendapat akronim telah lebih dahulu lahir ketimbang kaidah berbahasa yang secara resmi diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (PUEYD) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI) pertama kali tahun 1978.

Menurut Hardjoprawiro, guru besar ilmu bahasa Indonesia UNS Solo, mengutip PUEYD dan PUI Pembentukan akronim didasarkan pada kaidah: (a) akronim nama diri berupa gabungan huruf awal masing-masing kata yang disingkat, ditulis dalam huruf kapital, semisal TNI, atau PMI, (b) akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf yang disingkat, ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, seperti Pramuka, Dindikpora, serta (c) akronim yang bukan nama diri terdiri dari gabungan huruf, suku kata maupun gabungan keduanya ditulis dengan huruf kecil, misalnya bandara, armed.

Masih dalam PUEYD dan PUI, dalam pembentukan akronim perlu diperhatikan (a) jumlah suku kata akronim tidak melebihi suku kata yang lazim dalam bahasa Indonesia, serta (b) akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim.

Persoalan justru muncul karena kaidah PUEYD dan PUI tak ketat mengatur pembentukan akronim. Tampaknya PUEYD dan PUI lebih mengatur soal penulisan huruf kapital pada awal akronim bentuk baru. Terlebih, kaidah penggabungan dua kata atau lebih, tidak dijelaskan terperinci apakah pemenggalannya memiliki pola, atau semacam konsistensi. Bila dipenggal dua huruf pertama pada kata pertama, maka kaidah ini berlaku pula pada kata-kata selanjutnya. Begitu juga bila pemenggalan dilakukan di tengah atau akhir kata. Melalui konsistensi ini, Bappeda yang dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mestinya diakronimkan menjadi Bappeda.

Terobosan hukum sebagai "pasal penyelamat" bahkan diberikan oleh PUEYD dan PUI dalam catatan penting PUEYD dan PUI, yakni akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Secara sederhana kaidah ini memberi ruang bagi terbentuknya akronim yang "enak didengar". Jadi, sudah berapa akronim yang telah anda buat hari ini?

Malpraktik atau Malapraktik?

Kiki Zakiah Nur

Di Indonesia kasus yang diduga malpraktik atau malapraktik di bidang medis atau kedokteran sering kita dengar. Mungkin Anda tahu dan masih ingat dengan kasus yang dialami oleh Nyonya Again Isna Nauli pada 2004. Ia mengalami koma permanen setelah mendapat pengobatan dari tim medis di sebuah rumah sakit di Bogor.

Pada tahun yang sama, kasus paling spektakuler dialami oleh Sukma Ayu, aktris muda yang tenar lewat sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten. Ia mengalami koma selama lima bulan, sampai akhirnya meninggal dunia, setelah mendapat tindakan operasi dengan anestesi umum.

Masih pada 2010, sangat ramai dibicarakan tentang Prita, seorang ibu rumah tangga dijebloskan ke penjara karena memublikasikan kasus yang dialaminya (juga diduga malapraktik) ke internet.

Kasus-kasus tersebut menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan di masyarakat. Terlepas dari kaitannya dengan beberapa kasus di atas, ada hal yang menjadi perhatian saya, yakni kata *malpraktik* dan *malapraktik*. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tulisan yang tepat mengenai kata tersebut. Ini terbukti ketika saya membaca atau mendengar sebuah berita di media massa. Ada yang menyebut *malpraktik*, tetapi ada juga yang menyebut *malapraktik*. Perbedaan penyebutan tersebut bisa membingungkan masyarakat yang belum atau bahkan tidak tahu.

Sebenarnya, dari kedua kata itu, manakah yang tepat pemakaiannya, *malpraktik* ataukah *malapraktik*?

Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang mengadopsi bahasa asing, selain bahasa daerah dan Melayu. Pengadopsian bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah dengan memadankan istilah asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Pemadanan dilakukan melalui penerjemahan, penyerapan, atau gabungan keduanya.

Di dalam buku *Praktis Bahasa Indonesia 1* dijelaskan bahwa *malapraktik* merupakan padanan *malpractice* dari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, bentuk *mal-* awalnya bermakna buruk, lalu bermakna juga tidak normal, salah, mencelakakan, jahat. Sementara itu, ada bentuk *mala-* yang berasal dari bahasa Jawa Kuno yang diserap oleh bahasa Melayu. Bentuk *mala-* seasal dengan bentuk *mal-*. Artinya noda, cacat, membawa rugi, celaka, dan sengsara.

Bahasa Indonesia menggunakan bentuk *mala-* sebagai padanan *mal-*. Bentuk *mala-* merupakan unsur terikat yang tidak dapat secara tersendiri berfungsi sebagai sebuah kata dengan arti tertentu. Karena terikat, penulisannya harus digabung dengan kata yang mengiringinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tulisan yang tepat adalah *malapraktik*, bukan *malpraktik*. Contoh lainnya adalah *malagizi* padanan *malnutrition*, *malafungsi* padanan *malfunction*, *malasikap* padanan *malposition*, *malabentuk* padanan *malformation*, dan *malatindak* padanan *malfeasance*.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa *malapraktik* adalah tindakan tenaga profesional (profesi) yang bertentangan dengan *standard operating procedure (SOP)* (prosedur operasi standar), kode etik profesi, serta undang-undang yang berlaku, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian, yang mengakibatkan kerugian, kecelakaan, dan kematian terhadap orang lain.

Memang tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Kesalahan penulisan atau pengucapan kata *malapraktik* disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat. Namun, kesalahan yang terjadi seharusnya tidak terjadi lagi karena alasan sudah terbiasa.

Beberapa waktu yang lalu kita disuguhi berita tentang penyerangan Korea Utara terhadap negara tetangganya sekaligus musuhnya, Korea Selatan. Sementara itu, di tengah tingginya ketegangan setelah serangan yang mematikan tersebut, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Il, dan putra bungsu yang juga pewarisnya menyaksikan satu pertunjukan musik. Begitu kata sebuah media massa.

Kita juga disuguhi berita tentang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang menuai banyak protes dari warga DIY itu sendiri. Kemudian SBY menyatakan bahwa apa pun model dan opsi yang dipilih dan diputuskan DPR, tetap memberi hak dan peluang yang besar bagi para pewaris Kesultanan-Pakualaman untuk terlibat dalam proses pemerintahan DIY.

Yang ingin saya garis bawahi dari dua berita itu adalah penggunaan kata *pewaris*. Apa makna kata *pewaris* itu sebenarnya? Sudah tepatkah penggunaannya dalam menyampaikan maksud?

Jika Anda buka *Buku Praktis Bahasa Indonesia 1* terbitan Pusat Bahasa, di situ dapat dilihat makna kata *waris* dan turunannya, yaitu *mewarisi*, *mewariskan*, dan tentu saja *pewaris*. Dikatakan di situ bahwa *waris* berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal. *Warisan* berarti harta pusaka peninggalan. *Mewarisi* berarti (1) mendapat pusaka dari à, (2) menerima sesuatu yang ditinggalkan. *Mewariskan* berarti (1) memberi pusaka atau peninggalan kepada à, (2) menjadikan waris. *Pewaris* berarti yang memberi pusaka. Kata *pewaris* ini misalnya digunakan dalam kalimat Panglima Basar Sudirman adalah pewaris perjuangan melawan penjajah Belanda bagi bangsa *Indonesia*.

Dari keterangan itu, jelaslah bahwa kata *pewaris* mempunyai makna orang yang mewariskan, sedangkan orang yang menerima warisan disebut *waris*. Dari situ jelaslah juga bahwa penggunaan kata *pewaris* dalam dua berita yang disebutkan di atas masih salah.

Mengapa begitu? Dalam berita pertama dikatakan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il dan putra bungsu yang juga pewarisnya menyaksikan satu pertunjukan musik. Yang dimaksud pewaris dalam kalimat tersebut adalah putra bungsu Kim Jong-Il bukan Kim Jong-Il sendiri. Seharusnya putra bungsu Kim Jong-Il disebut waris bukan pewaris. Pewaris harusnya ditujukan pada Kim Jong-Il.

Dalam berita kedua dikatakan bahwa hak dan peluang yang besar tetap diberikan bagi para pewaris Kesultanan-Pakualaman untuk terlibat dalam proses pemerintahan DIY. Yang dimaksudkan dengan *pewaris* dalam kalimat tersebut adalah orang yang mewarisi Kesultanan-Pakualaman sekarang ini dan bukan orang yang mewariskan karena orang yang mewariskan sudah meninggal jadi tentu saja sudah tidak bisa terlibat dalam pemerintahan DIY.

Seharusnya orang yang mewarisi Kesultanan-Pakualaman yang sekarang ini terlibat dalam proses pemerintahan DIY disebut waris bukan pewaris. Pewaris harusnya ditujukan pada orang yang mewariskan Kesultanan-Pakualaman yang sudah tiada atau sudah meninggal dunia.

Penggunaan kata *waris* dan *pewaris* hingga saat ini memang masih terjadi banyak kekeliruan bahkan bisa dikatakan masih salah. Semoga dengan adanya tulisan ini masyarakat lebih mengerti dan bisa menghindari kesalahan penggunaan kata *pewaris*.

Dosa dalam Bahasa

Febrie Hastiyanto

Sebagai anak kandung kebudayaan, bahasa bukan sesuatu yang bersifat nonetis alias bebas nilai. Preferensi sistem nilai seseorang memungkinkan pemilihan kata tertentu, juga dengan maksud-maksud tertentu. Saya tak hendak mendiskusikan preferensi ini secara benar atau salah menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar, tetapi hendak memotret realitas kebahasaan secara sosiologis belaka.

Dalam banyak pidato atau sambutan, kita sering mendengar frase: *kurang dan lebihnya mohon maaf*. Termasuk frase *sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih*. Frase pertama berpotensi sumir, dan perlu sejumlah penegasan: mengapa ia harus minta maaf? Atas kekurangan apa, juga terhadap kelebihan yang mana. Begitu juga pernyataan terima kasih. Sesudah apa dan sebelum bagaimana.

Kalimat-kalimat ini lahir dalam konteks kesantunan berbahasa. Sudah kita ketahui bahwa bangsa kita terhitung sebagai bangsa yang moderat, cenderung menghindari konflik. Termasuk konflik yang mungkin timbul sebagai ekse pidato yang baru disampaikan. Kita terlalu takut “berdosa” sehingga sebelum “pelanggaran” terjadi, cepat-cepat kita “putihkan” dengan upaya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Padahal, kata *maaf* umumnya diucapkan setelah kesalahan dilakukan. *Terima kasih* juga biasanya disampaikan setelah pertolongan diberikan.

Kalimat *kurang dan lebihnya mohon maaf* saya kira lebih tepat disampaikan menjadi *mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan*. *Hal yang kurang berkenan* jelas merujuk pada tutur kata dan lagak lagu saat berpidato yang mungkin tak dapat diterima semua pendengar.

Begitu juga *sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih* dapat disampaikan lebih tegas menjadi *atas perhatian Saudara saya sampaikan terima kasih*. Bila pidato akan ditindaklanjuti dengan rencana tindak tertentu frasenyapun dapat dilengkapi menjadi *atas perhatian dan kerja sama Saudara saya sampaikan terima kasih*.

Begitu juga dengan pilihan pada kata *insya Allah*. Secara sederhana kata yang diserap dari bahasa Arab dan dipengaruhi oleh sistem nilai agama Islam ini dapat diartikan sebagai ‘jika Allah menghendaki’. Kata ini digunakan melengkapi penegasan kalimat-kalimat yang memiliki makna janji. Seorang

telah berjanji, tetapi di luar janjinya ia memasrahkan kepada Tuhan, atas hal-hal yang mungkin terjadi pada dirinya sehingga janji tak mampu ditunaikan.

Namun hari ini, makna *insya Allah* secara efektif digunakan sebagai penegasan bahwa janji yang telah diikrarkan, sangat mungkin akan dilanggar, dan kita yang dijanjikan agar "harap maklum". Tidak sedikit juga yang menjadikan idiom *insya Allah* sebagai frase penolakan ketika diminta untuk berjanji.

Penolakan menggunakan frase *insya Allah* menyelamatkan kita dari ketidaksantunan menghindari janji. Kita pun sudah seharusnya mafhum, bila ada orang berjanji dan mengucapkan *insya Allah* dalam konteks ini, dapat dimaknai sebagai "gak janji deh".

Untuk alasan-alasan menghindari "dosa", tidak sedikit kita menggunakan idiom *insya Allah* untuk sesuatu yang sebenarnya telah pasti terjadi, dan kita yakin mampu mengingatnya. Seorang sahabat saya, yang saya tahu telah sarapan beberapa waktu sebelumnya, suatu ketika ditanya kakaknya yang baru tiba dari luar kota: "sudah sarapan"? Sahabat saya itu tak ragu menjawab: "insya Allah sudah".

Saya tak menganggap sahabat saya ini melanggar kaidah bahasa. Saya mengapresiasinya bila ia memilih kata tersebut dalam konteks religiositas. Namun saya menyayangkan bila ia menggunakan kata tersebut karena takut berdosa sebab berbahasa.

Senyampang Voltaire Huruf Miring

Iwan Nurdaya-Djafar

Pada artikel “Membangun Kembali Spritualitas Desa” yang ditulis Syaiful Irba Tanpaka (Lampung Post, 22 Januari 2011, hlm. 20) saya memergoki penulisan kata *senyampang* yang ditulis dengan huruf miring. Saya tidak tahu apakah penulisan dengan huruf miring itu dilakukan oleh Syaiful atau oleh korektor bahasa harian ini. Yang jelas, kata *senyampang* di situ ditulis dengan huruf miring.

Pada artikel saya “Menggagas Kamus Besar Bahasa Lampung” (Lampung Post, 31 Desember 2010, hlm. 20) saya juga memergoki penulisan nama *Voltaire* yang ditulis dengan huruf miring. Bahkan nama *Voltaire* di situ ditulis dengan huruf kecil pada huruf pertama.

Kita kutip, “Nama lain yang ingin saya sebut adalah Hermanus Neubronner van der Tuuk (1824-94), yang karena tulisannya memiliki suatu kecemerlangan yang sangat tajam bisa menjadikan dirinya voltaire dari Hindia Belanda.” Perlu saya tandaskan, penulisan sedemikian itu bukan berasal dari saya, melainkan dari korektor bahasa harian ini.

Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, penulisan huruf miring dalam cetakan dipakai untuk: (1) menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan; (2) untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata; (3) untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.

Dari ketiga aturan ini, kiranya tidak ada alasan untuk menuliskan kata *senyampang* dan nama *Voltaire* dengan huruf miring. Kata *senyampang* adalah kata dalam bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) halaman 1041. *Senyampang* memiliki lima arti: (1) kebetulan; selagi; (2) mujurlah; untunglah; (3) kalau-kalau; sekiranya; (4) mentang-mentang; (5) jika; sekiranya; kalau. Kata *senyampang* bukan pula kata yang diserap dari bahasa daerah. Alih-alih dari bahasa daerah, kata *senyampang* justru untuk menggantikan kata mumpung yang berasal dari bahasa daerah Jawa.

Dalam KBBI halaman 1288 terdapat ungkapan bahasa daerah *aji(-aji) mumpung* yang memiliki dua arti: (1) penggunaan *senyampang*; selagi sebagai senjata andalan; (2) pemanfaatan situasi dan kondisi untuk keperluan yang menguntungkan diri sendiri selagi memegang jabatan yang memungkinkan

adanya peluang untuk hal itu. Arti pertama adalah arti lugas, arti kedua adalah arti kias. Akan halnya *Voltaire*, itu adalah nama orang, bukan kata atau ungkapan asing. Berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Karena *Voltaire* adalah nama orang, harus ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama, yaitu *Voltaire*, dan bukan *voltaire*. Juga tidak perlu ditulis dengan huruf miring sehingga menjadi *voltaire*.

Tetapi, siapakah *Voltaire*? Nama sebenarnya Francois Marie Arouet (1694—1778), adalah pengarang besar Prancis pada abad ke-18. Dilahirkan di Paris, dan menghabiskan tahun-tahun 1726—1729 di dalam pengasingan di Inggris karena suatu perkecokan dengan seorang bangsawan Prancis. *Voltaire* ikut ambil bagian dalam Revolusi Prancis pada 1778.

Dia adalah sastrawan, sejarawan, dan filosof yang menulis sebanyak tujuh puluh jilid buku berupa drama, filsafat, sejarah, pamflet politik dan hikayat filosofis. Di antaranya *Lettres Philosophiques*, *Siecle de Louis XIV*, *Zadig ou la DestinTe*, dan *Candide ou l'ÆOptimisme*. Dia kembali ke Prancis pada usia 84 tahun dan menikmati suatu periode singkat kecemerlangan sebelum kematiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kutipan di atas dapat diperbaiki menjadi. Nama lain yang ingin saya sebut adalah Hermanus Neubronner van der Tuuk (1824-94), yang karena tulisannya memiliki suatu kecemerlangan yang sangat tajam bisa menjadikan dirinya *Voltaire* dari Hindia Belanda. Di sini, Van der Tuuk yang tak kalah hebatnya disetarakan dengan kecemerlangan *Voltaire*.

Lidah untuk Menggigit

Dian Anggraini

Duduk berlama-lama di depan televisi sebenarnya bukanlah kegemaran saya. Akan tetapi, belakangan ini, *nyanggong* di depan layar kaca terpaksa saya lakukan. Bukan karena kepincut sinetron atau gosip selebritas, melainkan saya terusik iklan salah satu produk pasta gigi.

Seorang ibu muda dengan lugas bercerita tentang gigi sensitifnya. Kegemarannya makan es krim terganggu sehingga ia terpaksa menggunakan lidahnya untuk menggigit. Namun, masalah itu teratasi karena ia menggunakan pasta gigi "x". Kini, ia sudah tidak merasa ngilu lagi.

Sekilas memang tidak ada yang salah dengan gigi ataupun produk yang ditawarkan. Hanya saja, saya terganggu dengan diksi yang dipergunakan ibu itu. "Jadi, saya pakai lidah saya untuk menggigit es krim," ujarnya. Beberapa kali saya berusaha menerjemahkan maksudnya, lidah untuk menggigit, tapi tetap saja imajinasi saya tak sampai.

Penasaran, saya membuka *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Dalam kamus tersebut dijelaskan *lidah* adalah bagian tubuh dalam mulut yang dapat bergerak-gerak dengan mudah, gunanya untuk menjilat, mengecap, dan berkata-kata, sedangkan menggigit berarti aktivitas menjepit (mencekam dsb.) dengan gigi. Kalaupun ada, yang tertulis hanya idiom gigit lidah yang berarti merasa malu dengan cemoohan atau kecaman orang lain.

Saya lalu beralih ke kata *gigi*. *Gigi* bermakna tulang keras dan kecil-kecil berwarna putih yang tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya untuk mengunyah atau menggigit. Selanjutnya hanya ada idiom *gigi; gigi dengan lidah* (gigi dengan lidah adakalanya bergigit juga) yang artinya suami istri (sanak saudara, sahabat karib, dsb.) adakalanya bertengkar juga.

Sejauh ini, saya sama sekali tidak menemukan fungsi lidah sebagai pengganti fungsi gigi. Karena itu, saya lebih setuju jika Yvete, nama ibu muda tersebut, mengucapkan: "Jadi saya pakai lidah saya untuk menikmati es krim".

Tidak sampai di sini saja. Pada akhir curhatnya, eksekutif perusahaan ini lagi-lagi mengungkapkan kalimat yang kembali membuat saya mengernyitkan dahi. "Menyikat gigi dengan 'x' dua kali sehari, sekarang saya tidak terasa ngilu lagi". Saya rasa kalimat itu rancu.

Kerancuan muncul karena kalimat tersebut tidak paralel. Pada anak kalimat ada predikat *menyikat* dan pada induk kalimat predikatnya *terasa*. Jika

taat asas paralelisme, lebih baik Yvete mengatakan "Menyikat gigi dengan 'x' dua kali sehari, sekarang saya tidak merasa ngilu lagi".

Maman S. Mahayana dalam *Bahasa Indonesia Kreatif* menyatakan banyak produk barang atau jasa ditawarkan tanpa disertai dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar. Akibatnya, ketika kita berusaha memahami maknanya, yang muncul adalah kesan yang aneh dan lucu.

Menurut Maman, bahasa iklan, karena sifatnya yang persuasif, selalu berusaha mengugah emosi pembaca atau pendengar. Tujuannya agar yang menjadi sasaran iklan, melakukan sesuatu atau bertindak sesuai dengan amanat iklan tersebut. Oleh karena itu, dalam bahasa iklan, bentuk rayuan, anjuran atau ajakan, bahkan kata-kata yang dapat menimbulkan rasa penasaran, sebenarnya hanya kemasam untuk "menutupi" amanat yang ingin dicapai iklan.

Selain itu, iklan juga merupakan pemberitahuan kepada khalayak. Dalam pemberitahuan tersebut, iklan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa sebagai alat komunikasi dalam iklan sangat penting di samping terdapat gambar-gambar yang mendukungnya (Sustiyanti, 2010:2). Jadi, jika bahasa yang digunakan mampu menarik atau memengaruhi konsumen niscaya produk tersebut laris manis. Sebaliknya, jika bahasa yang disampaikan *blentang-blentong*, dijamin pendengar malah berlalu.

Turun ke Bawah, Pleonasmekah?

Diah Meutia Harum

Dalam sebuah perbincangan di Kantor Bahasa, seseorang dari kami berceletuk, "Turunlah ke bawah!" Yang lain menyanggah dengan tenang, "Tentulah ke bawah, kalau turun. Lalu, mengapa mesti turun ke bawah?" Ujung-ujungnya, muncullah istilah pleonasme, muara dari perbincangan itu.

Bahasa adalah sistem lambang yang bersifat mana suka, hasil kesepakatan bersama antarpemakainya, yang digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan interaksi. Dalam berinteraksi acap dijumpai pemakaian kata-kata yang berlebihan. Kata-kata yang berlebihan dalam pemakaian itulah dikatakan pleonasme. Pleonasme dari kata Latin *pleonasmus*, artinya 'kata berlebih-lebihan' (Badudu, 1985: 55). Pleonasme dalam bahasa berarti pemakaian kata yang berlebihan-lebihan yang sebenarnya tak perlu.

Benarkah "Turunlah ke bawah" pleonasme?

Dalam *KBBI* edisi IV (2008) kata *turun* berarti 'bergerak ke arah bawah, bergerak ke tempat yang lebih rendah dari pada tempat semula', sedangkan kata *bawah* berarti 'tempat yang lebih rendah'. Untuk itu, dapat dikatakan kalimat itu berlebih-lebihan karena pemakaian kata yang tidak perlu. Semestinya kalimat itu cukup dengan "Turunlah!" Karena turun itu sudah menjelaskan ke bawah. Sebentuk dengan kalimat, *Dia naik ke atas* dapat ditulis *Dia naik* sebab kata *naik* sudah tentu menuju ke atas.

Dalam bahasa Indonesia, setidaknya, ada tiga jenis bahasa pleonasme. Pertama, dua kata atau lebih yang sama maknanya dipakai sekaligus dalam suatu ungkapan (bersinonim), seperti kata atau istilah *agar supaya*: *Rapat Istimewa PSSI perlu dilaksanakan agar supaya usul klub didengarkan*.

Penggunaan kata atau istilah *agar supaya* tidak perlu dipakai bersama, dapat kita pilih salah satunya: kata *agar* atau *supaya*. Bentuk lain, seperti kata atau istilah *mulai dari*: *Mulai dari waktu itu dia sudah tidak main bola lagi*. Kata atau istilah *mulai* dan *dari* pun dapat dipakai salah satunya. Begitu pula dengan kata atau istilah *mulai sejak*, *ulang kembali*, *maju ke depan*, *demi untuk* atau pada zaman dahulu kala.

Kedua, penggunaan kata yang kedua yang tidak diperlukan lagi karena makna yang terkandung pada kata itu sudah terdapat dalam kata yang (disebut) pertama, sekedar contoh *mundur ke belakang*: *Para pendukung meminta Moammar Khadafi mundur ke belakang karena keadaan tidak aman*.

Penggunaan kata *mundur*, tentu memiliki arti ‘ke belakang’. Untuk itu, tidak perlu dipakai, cukup memilih salah satu saja.

Begitu pula dengan kata *tampil ke depan*, *maju ke depan*, dan lainnya. Bentuk lain yang acap kita jumpai dalam keseharian, seperti kata *menengadahkan ke atas*, *menundukkan kepala*, *melihat dengan mata kepala sendiri*, *kambuh kembali* atau *pulih kembali*. Semestinya cukup dikatakan *menengadahkan*, *menunduk*, *melihat*, *kambuh* atau *pulih* saja.

Ketiga, dinyatakan dalam ungkapan terjadi penjamakan. Sekadar contoh *para tamu-tamu*: *Para tamu-tamu berdiri ketika prosesi nikah dimulai*. Penggunaan kata *para* dapat dihilangkan atau tidak mengulang kata *tamu*, cukup *tamu-tamu* atau *para tamu*. Bentuk lain ada kata *beberapa*. *Beberapa negara-negara*, atau *kumpulan kasus-kasus*, *saling tarik menarik*, *banyak anak-anak* seharusnya dikatakan *beberapa negara* atau *negara-negara*, *kumpulan kasus* atau *kasus-kasus*, *saling tarik* atau *tarik menarik*, *banyak anak* atau *anak-anak*.

Pleonasme menurut Badudu (1993) timbul karena beberapa kemungkinan, di antaranya, pertama dibuat dengan tidak sengaja karena tidak tahu; kedua, dibuat karena tidak tahu bahwa kata yang digunakan mengandung pengertian yang berlebih-lebihan; ketiga, dibuat dengan sengaja sebagai gaya bahasa untuk memberikan tekanan pada arti.

Lalu, bagaimana dengan cara berbahasa Anda? Yang pasti, berbahasalah sesuai situasi dan kondisi sehingga dapat dikatakan baik dan benar. Bravo, bahasa Indonesia.

Bahasa dan Perempuan

Diah Meutia Harum

Sebuah masyarakat dikonstruksikan oleh budayanya. Dalam hal ini, bahasa sebagai faktor penting yang berperan dalam kebudayaan terbentuk oleh budaya darimana masyarakat tersebut berasal. Indonesia dengan berbagai suku dan budaya memang kental dengan budaya patriarki. Masyarakat yang terhegemoni baik dengan tatanan maskulin maupun feminin tentu saja berperan penuh dalam pembentukan bahasa.

Luce Irigaray, seorang linguist dan feminis asal Prancis, menguraikan bagaimana pengaruh bahasa terhadap subjektivitas, terutama subjektivitas perempuan, sekaligus menegaskan bahasa harus berubah agar subjektivitas perempuan dapat dikenali di ranah budaya. Luce Irigaray secara khusus menyoroiti pembedaan gender dalam bahasa Prancis yang memang menandai bahasanya secara spesifik dengan identitas laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan bahasa Indonesia?

Saya tak ingin membuat kening Anda berkerut ketika membaca kolom ini. Barangkali saya membawakan isu ini sebagai sebuah obrolan ringan yang mungkin saja kita sebagai pengguna bahasa tak begitu menyadari muatan apakah yang selama ini terlontar dari mulut kita, namun sesungguhnya patut untuk kita renungkan. Anda, sebagai pengguna bahasa Indonesia, pernahkah selama ini mengamati bahasa yang Anda gunakan sehari-hari?

Perempuan adalah salah satu identitas diri. Bahasa yang terutama menyangkut dengan identitas dan peran perempuan akan tampak dalam penggunaannya dalam masyarakat dengan tatanan maskulin.

Sekadar contoh, lema *lacur* dalam *KBBI* memiliki arti 1 malang; celaka; sial; 2 buruk laku. Akan tetapi, alangkah mengejutkan bahwa kata *pelacur* memiliki makna sebagai perempuan yang melacur; wanita tunasusila; sundal.

Di sini terlihat bagaimana lema *lacur* yang memiliki makna yang sebenarnya netral dan objektif mengalami penyempitan makna menjadi *pelacur* yang spesifik tertuju pada perempuan. Belum lagi idiom-idiom yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, sebutan *wanita* yang dulu dipandang lebih terhormat dan bermartabat dibandingkan dengan sebutan *perempuan* yang dianggap melecehkan. Padahal, konon katanya kata *wanita* berarti 'wani

ditata' sedangkan *perempuan* berarti 'empu yang berarti memiliki dirinya sendiri'.

Diskriminasi juga tampak dalam hal profesi, selalu saja dalam berbagai profesi yang selama ini diasumsikan sebagai profesi yang khas milik kaum laki-laki akan selalu disertai dengan akhiran *wanita*. Misalnya, *pilot wanita*, *astronaut wanita*, *pembalap wanita*, *petinju wanita*, *kernet wanita*, dan lain-lain. Padahal kita tak pernah mendengar kata *penari laki-laki*, *koki laki-laki*, *perawat laki-laki*, atau apa pun itu yang berkaitan dengan profesi khas wanita.

Sungguh saya tak ingin menyampaikan ide yang bisa membuat kontroversi di sini karena dalam beberapa hal, penggunaan istilah yang menyangkut perempuan juga terkait dengan makna yang mulia, misalnya, ibu pertiwi, ibu kota, ibu jari, dan lain-lain.

Terakhir, kalau boleh, saya ingin menyampaikan sesuatu yang ringan kepada Anda pembaca. Dalam dunia perhantuan, kita mengenal berbagai jenis hantu. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa hantu dinamai berdasarkan jenis kelamin? Ada hantu laki-laki, hantu perempuan, dan hantu dengan jenis kelamin yang kurang jelas, yaitu pocong.

Hantu laki-laki sejauh yang bisa saya temukan adalah jin, tuyul, dan genderuwo, sedangkan hantu perempuan memiliki nama yang bermacam-macam, misalnya, kuntilanak, puntianak, wewe gombel, sundel bolong, peri, dan apalah nama-nama hantu lain yang saya sendiri merinding untuk menyebutnya.

Dahsyatnya lagi, konon hantu dengan jenis kelamin perempuan ini efeknya lebih menakutkan dilihat dari penampilan dan suaranya dibandingkan dengan hantu laki-laki. Bisa jadi, dalam hal ini mereka lebih beruntung daripada rekan perempuan mereka di dunia manusia.

Problematika Imbuan *Ter-*

Chairil Anwar

Saat berkomunikasi, kita sebagai pemakai bahasa Indonesia tentu dituntut untuk menerapkan kaidah kebahasaan dengan cermat. Namun, dalam penggunaannya sehari-hari, tidak sedikit ditemukan penyimpangan yang dilakukan masyarakat bahasa terhadap kaidah yang seharusnya ditaati. Salah satunya adalah ketidakcermatan dalam menggunakan imbuan *ter-*.

Sesuai kaidah, salah satu fungsi awalan *ter-* adalah menyatakan 'ketidaksengajaan' di samping menyatakan 'paling' seperti kata *terbaik* dan *tercantik*, lalu menyatakan 'dapat di (kata dasar)' seperti kata *tercapai* dan *terjangkau*.

Akan tetapi, pada kasus tertentu, untuk menyatakan makna 'ketidaksengajaan', pemakai bahasa kerap menggantikan imbuan *ter-* dengan imbuan *di-*. Dengan begitu, tidak jarang dalam penulisan berita sekalipun, kita jumpai kalimat berikut ini: *Pengendara motor tewas ditabrak truk pengangkut semen*. Dalam konteks kalimat ini, sopir truk sebenarnya tidak berniat untuk menabrak pengendara motor nahas tersebut. Dengan kata lain, kejadian tersebut memang tidak benar-benar diharapkan oleh sopir, dan tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Berdasarkan fungsi imbuan *ter-* yang telah dipaparkan sebelumnya, pemakaian imbuan *di-* pada kata *ditabrak* dalam kalimat di atas adalah keliru, alias tidak berterima. Penggunaan yang tepat berdasarkan konteks kalimat itu adalah menggunakan imbuan *ter-*. Dengan demikian, kalimat itu seharusnya menjadi *Pengendara motor tewas tertabrak truk pengangkut semen*.

Penyimpangan serupa juga terdapat dalam kalimat-kalimat berikut ini: *Tikus itu mati dilindas motor*, atau *Seorang ibu diserempet opelet saat menyeberang*. Berdasarkan penguraian itu, dapat disimpulkan bahwa kunci dari penggunaan imbuan *ter-* dalam kasus ini adalah logika berbahasa atau penalaran, yang dapat kita analisis berdasarkan konteks kalimatnya.

Berkaitan dengan kasus sebelumnya, pada contoh-contoh berikut ini, imbuan *di-* dan *ter-* dapat diterima, bergantung dari maksud yang akan disampaikan—apakah menyatakan kesengajaan atau ketidaksengajaan. *Kamus bahasa Indonesia itu dibawa oleh Ujang*. Kalimat itu bermakna bahwa kamus tersebut memang sengaja dibawa. Apabila kalimatnya diubah menjadi seperti

berikut ini: *Kamus bahasa Indonesia itu terbawa oleh Ujang*. Maka, makna kalimat berubah, berarti ‘Ujang tidak sengaja membawa kamus tersebut’.

Dari salah satu problematika afiks *ter-* ini, dapat disimpulkan bahwa konteks memang melatarbelakangi sebuah komunikasi, dalam hal ini melalui media tulisan. Dan sebagai pemakai bahasa, konteks membantu kita untuk menerapkan kaidah bahasa Indonesia dengan cermat.

Q, huruf ketujuh belas abjad Indonesia merupakan huruf yang paling sedikit memiliki kosakata dibanding huruf abjad yang lain. Merujuk *KBBI* 1991, *q* hanya mempunyai delapan huruf, yaitu: qaf, qari, qariah, qasar, qiamulail, qiraah, qiraat, Quran.

Dalam *KBBI* edisi ketiga, 2005, *q* hanya bertambah dua kata, yakni *qi*, dan *qudsi*. *KBBI* edisi keempat, 2008 pun, *q* hanya memiliki penambahan kata, yaitu qanun, quasar, qurah, qurani. Itu pun ada beberapa kata yang memiliki akar kata sama (misalnya, *qa-ra-ba* yang artinya membaca menjadi qari qariah, qiraah, qiraat, Quran). Sedang *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, penerbit *Media Center*, tanpa tahun terbit, *q* mempunyai tujuh belas kata yaitu: qaf, qada, qaidah, qalam, qalbu, qamar, qamariah, qanaah, qannat, qari, qariah, qasar, qarun, qiam, qiamulail, qiraat, Quran.

Bila dibanding bahasa lain, misalnya Inggris, *q* masih tergolong miskin. Bandingkan dengan *Kamus Inggris-Indonesia*, karya John M. Echols dan Hassan Shadily, *q* memiliki lebih dari seratus lema.

Pertanyaan yang timbul adalah, mengapa lema *q* sangat sedikit? Mengapa *q* kebanyakan menyerap dari bahasa Arab? Apakah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia tidak memiliki kata yang diawali dengan *q*? Mengapa *q* diserap menjadi *k*?

Uraian berikut lebih condong pada ulasan *q* yang diserap dari bahasa Arab, tidak menjawab pertanyaan tersebut satu-per satu, tetapi penjelasannya telah mewakili jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada mulanya ada keyakinan bila *q* yang diserap dari bahasa Arab itu cukup kaya, tetapi dengan terbitnya *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdiknas, 1989, *q* kemudian menjadi miskin.

Dalam penyesuaian ejaan, integrasi unsur serapan dalam bahasa Indonesia, tertulis unsur yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan bahasa asing (Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris), hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesiannya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Sebagai contoh *q* menjadi *k*, *aquarium* 'akuarium', *quantity* 'kualitas', *quality* 'kualitas', *frequency* 'frekuensi', kata-kata serapan bahasa Inggris.

Merubah dan Dirubah

Priyo Anggono

Ada sebuah kata dalam lagu yang dinyanyikan oleh Once, vokalis dari band Dewa 19 berjudul *Aku Mau* yang terdengar janggal di telinga, tapi dinikmati oleh masyarakat. Kata tersebut adalah *merubah* yang terletak di larik pertama lagu tersebut. Lirik lengkapnya adalah *Kau boleh acuhkan diriku/dan anggapku tak ada/tapi takkan merubah perasaanku/kepadamu*. Lalu, adakah yang salah dari kata tersebut?

Bila kita cermat memperhatikan masyarakat saat menggunakan bahasa Indonesia, bukanlah hal yang aneh jika sebagian besar masyarakat terbiasa menggunakan kata *merubah*. Bahkan, kalau kita mengetik kata *merubah* di *Google*, ternyata banyak sekali hasil pencarian yang memunculkan kata tersebut.

Hal ini mengindikasikan kata *merubah* sudah menjadi bagian yang dianggap benar saat digunakan. Kata itu seolah-olah sudah menjadi kata yang umum, biasa, dan benar. Tidak perlu lagi diperdebatkan atau diotak-atik lagi karena dirasa tidak ada yang salah.

Bagi mereka yang berkecimpung atau memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa, pasti akan merasa geli dan risih saat mendengar kata *merubah*. Sebuah kata yang sebenarnya salah tapi sering diucapkan dan dianggap benar oleh mayoritas masyarakat saat ini.

Bahasa Indonesia termasuk salah satu jenis bahasa aglutinatif, yaitu bahasa yang mengandalkan afiks atau imbuhan (awalan, akhiran, sisipan, konfiks) untuk membentuk kata turunan.

Banyak masyarakat kita yang menganggap remeh proses afiksasi pembentukan kata dasar menjadi kata turunan ini sehingga mereka tidak lagi memperhatikan mana kata dasar dan mana afiks, sehingga penggunaan bahasa Indonesia tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi tetap dianggap benar oleh penggunanya.

Jika kita urai, kata *merubah* untuk memisahkan kata tersebut menjadi kata dasar dan afiks, akan terlihat jelas di mana letak kesalahannya. Saat penguraian kata *merubah* pada lagu tadi akan terjadi sedikit kesulitan untuk menentukan mana kata dasarnya dan mana bagian afiksnya. Apakah kata *merubah* tersebut berasal dari awalan *mer-* + *ubah* atau dari awalan *me-* + *rubah*.

Bila kata dasarnya adalah *ubah*, jelas ada kesalahan pada saat pembubuhan awalan karena di dalam Bahasa Indonesia tidak mengenal awalan *mer-* melainkan *meng-* (*me-*, *men-*, *mem-*, *meny-*, *menge-*). Sehingga bisa dipastikan penulisan atau penggunaan kata *merubah* dalam syair lagu *Aku Mau* di atas adalah salah. Kata tersebut seharusnya ditulis mengubah yang terbentuk dari awalan *meng-* + *ubah* sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Jadi, penulisan atau pengucapan kata *merubah* adalah salah sedangkan yang benar adalah *mengubah*.

Kesalahan serupa juga terjadi dalam proses pembentukan kata yang melibatkan proses afiksasi lainnya, seperti yang terjadi pada kata *dirubah*. Penulisan kata *dirubah* jelas merupakan kesalahan, karena seharusnya ditulis diubah. Sebab, dalam *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* tidak mengenal awalan *dir-*tetapi awalan *di-*.

Sikap peduli dan cermat dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan mutlak dikuasai bagi masyarakat pengguna bahasa itu sendiri agar bahasa yang menjadi ciri khas bangsa selalu lestari dan dinamis.

Bus Tak Masuk *Bus Lane*

F. Moses

Saya rasa, menyoal istilah asing tak akan pernah khatam di negeri ini. Pemekaran seperti *ranking* 'pemingkatan', *take off* 'lepas landas', *random* 'acak', *layout* 'tata letak', *supermarket* 'pasar swalayan', *briefing* 'taklimat', *snack* 'kudapan', dan seterusnya. Tentunya masih banyak lagi. Apalagi serapan seperti *effect* menjadi efek, *cartoon* 'kartun', *vacuum* 'vakum', *phase* 'fase', *rhetoric* 'retorika'.

Saya rasa kata-kata itu lebih arif digunakan ketimbang memaksakan kata-kata asing tersebut dalam bahasa keseharian. Ironisnya, percampuran kedua bahasa (istilah: *indoglish*) terpampang di etalase megah fasilitas umum, seperti *The Plaza*..., ... *Laundry and Dry Cleaning*, ... *Tailor*, ... *Haircut*, dan istilah lainnya.

Syahdan, dari permasalahan tersebut, ada cerita kecil tentang rekan saya bermama Sun'an di Jakarta, tepatnya di sebuah perusahaan seluler terbesar di bilangan Jakarta Pusat.

Betapa pusing tujuh keliling dirasanya. Kata-kata asing berserakan dalam jarak pandangannya. Ia pun limbung. Bukan lantaran tak mengerti kata-kata tersebut, melainkan sebuah pertanyaan atas identitas diri di negeri tercinta ini. Ia seperti memasuki negeri asing bak bukan negerinya sendiri. Kira-kira beginilah ceritanya.

Tatkala lepas terik siang, masuklah ia ke perusahaan tersebut. Semula kepanasan, tapi seketika luluh lantaran pendingin ruangan mampu meredakannya dari gerah. Namun apa daya, disuruh menunggu justru membuatnya makin kecewa lantaran rentetan kata-kata asing terpampang dari pojok pandangannya, bak anak panah terlepas dari busur menghunjam hati kecilnya. "Rasanya kayak di luar negeri saja, kayak bukan tinggal di Indonesia", katanya membatin.

Kata-kata asing seperti memaksanya mengakrabi menjadi panorama yang memilukan. Mau ikut mengucapkan pun menjadi kelu. Sekali lagi, bukan karena tak mengerti arti seperti *meeting room* atau ruang pertemuan, *cashier* 'kasir', *exit* 'keluar', *gallery* 'galeri', *reception* 'penerimaan', *reserved* 'pemesanan', *fire extinguisher* 'pemadam api', *customer care* 'layanan pelanggan', *counter* 'juru hitung', melainkan membuat dirinya gamang. Yang tak lain sekadar bikin panorama sensual berbahasa belaka.

Lantas ia bertanya kepada satu dari karyawan tersebut, dijawabnya pula dengan alasan tak mengerti maksud dan tujuannya. Padahal sepele: karena sesungguhnya pasar seluler ini ditujukan ke masyarakat yang mana? Barangkali itu baru contoh sekuku.

Dari pengalaman teman saya tersebut, (mungkin) juga acap dialami beberapa masyarakat dalam sadar atau sebaliknya. Tak bermaksud menapis euforia nasionalis, marilah kita meresapi kembali Hari Sumpah Pemuda beberapa hari lalu. Sebab, betapa memalukan atas nama global tapi bertingkah bahasa keinggris-inggrisan.

Satu lagi, suatu ketika dari arah Merak menuju Jakarta saat melintas di Kota Tangerang, bus yang saya tumpangi malah menghindar dari ruas *bus lane*. Ah, andai saja bertuliskan *khusus bus*, tentu tak menasar ke jalur umum yang kebetulan sedang macet. Saya tak tahu, lantaran si sopir tak mengindahkan aturan atau karena sesuatu yang enggan dipahaminya. Itu baru *bus lane*, belum lainnya. Saya percaya Anda lebih melihat kelainan-kelainan tersebut.

PENULIS

Adian Saputra

Lahir di Tanjungkarang, 27 Januari 1979. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa Bandar Lampung ini sehari-hari bekerja di *Lampung Post* sebagai anggota tim bahasa.

Yulfi Zawarnis

Lahir di Bukittinggi, 7 Juli 1978. Lulus S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta tahun 2003 dan S-2 Linguistik Universitas Indonesia tahun 2009. Saat ini ia menjadi peneliti bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Yuliadi M.R.

Lahir di Kerinci, 8 Juli 1974. Lulus S-1 Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini dia sedang menuntut ilmu bidang pendidikan bahasa Indonesia Universitas Lampung dan bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Ninawati Syahrul

Lahir di Padang 8 Agustus 1969. Lulus S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Andalas Sumatera Barat dan S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta tahun 2008. Saat ini dia bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Jakarta menjadi pengurus program siaran *Binar* (Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar) TVRI pusat Jakarta.

Oyos Saroso H.N.

Lahir di Purworejo, 16 Maret 1969. Lulus S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Kini dia aktif sebagai jurnalis dan sastrawan di Bandar Lampung.

Fadhilatun Hayatunnufus

Lahir di Telukbetung, 20 Maret 1982. Lulus S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Saat ini bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Ratih Rahayu

Lahir di Bandung, 21 April 1976. Lulus S-1 dan S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saat ini bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Mamad Ahmad

Lahir di Garut. Saat ini bekerja di Balai Bahasa Bandung.

Dian Anggraini

Lahir di Bangka, 2 Mei 1978. Lulus S-1 Bahasa dan Sastra Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yunisla Bandarlampung. Saat ini bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Hesma Eryani

Lahir di Palembang. Lulusan Universitas Sriwijaya, Palembang. Ia merupakan seorang jurnalis harian Media Indonesia yang pernah aktif di Lampung Post. Pernah mengajar di Universitas Bandarlampung, Universitas Lampung, IAIN Radin Intan Lampung, dan IAIN Raden Fatah, Palembang.

Tri Wahyuni

Lahir di Kendal. Lulus dari Universitas Muhammadiyah Semarang, program studi sastra Inggris. Kini dia bekerja di Balai Bahasa Semarang.

Agus Sri Danardhana

Lahir di Sragen, 23 Oktober 1959. Lulus S-1 Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S-2 Kesusasteraan Universitas Indonesia. Menjadi Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung (2004—2009), sejak tahun 2009 menjadi Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau.

Ki Sanyoto

Pengajar Bidang Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di SD Taman Siswa Telukbetung, Bandarlampung

Chairil Anwar

Pemerhati bahasa dan sastra. Alumnus FKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah angkatan 2006, Universitas Lampung.

Kiki Zakiah Nur

Lahir di Bogor, 8 Oktober 1974. Alumnus Universitas Padjajaran Bandung, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ia bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Febri Hastiyanto

Lahir di Bukit Kemuning. Lulus S-1 Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Aktif di Kelompok Studi IdeA. Penulis yang produktif. Artikel dan cerpennya tersebar di media massa nasional maupun lokal. Puisinya *Sajak Seorang Pejoang yang dikhianati Senapannya* menjadi finalis Lomba Cipta Puisi Prosaik Krakatau Award 2009.

Sustiyanti

Lahir di Pemalang, 8 Juli 1975. Alumnus pascasarjana Universitas Indonesia, saat ini bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Iwan Nurdaya-Dja'far

Lahir di Tanjungkarang, 14 Maret 1959. Sastrawan yang pernah menjuarai lomba cipta puisi dalam porseni mahasiswa PTS se-Jawa Barat tahun 1983, dengan judul puisi "Di Bawah Panji Almamater" juga piawai dalam berteatr yang dibuktikan dengan menjadi pemenang Pria Terbaik dengan mementaskan Lakon Orang Gila di Atas Atap karya Ki Kuchi Khan yang kemudian diadaptasi ke kultur Sunda. Karya sastranya tersebar di media massa nasional dan lokal.

Diah Meutia Harum

Peneliti bidang kesusasteraan pada Kantor Bahasa Provinsi Lampung, lulus pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012.

Suheri

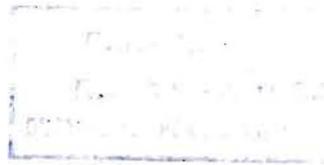
Lulus S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Bandar Lampung. Pengajar bidang Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur.

Priyo Anggoro

Lahir di Lampung Tengah. Lulus S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta. Kini menjadi pengajar bidang Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP Satya Dharma Sudjana, Lampung Tengah.

F. Moses

Lulusan Sastra Indonesia Universitas Sanata Darma Yogyakarta ini bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta. Ia produktif menghasilkan karya sastra berupa cerpen yang dipublikasikan di media massa nasional maupun lokal.



15-0121

15-0121
15-0121
15-0121
15-0121